



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tahun 2025





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT **INSPEKTORAT**

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dilakukan selama tahun 2025. Laporan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan, pencapaian kinerja, hingga permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola pengadaan yang efisien, akuntabel, dan transparan. Melalui laporan ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih baik mengenai langkah-langkah yang telah diambil dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan organisasi dan akuntabilitas kinerja. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Padang, 31 Januari 2026

 **KEPALA BIRO**
PENGADAAN BARANG DAN JASA 



CERRY M. ST. MM
NIP. 19761016 200812 1 001

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dilakukan selama tahun 2025. Laporan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan, pencapaian kinerja, hingga permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola pengadaan yang efisien, akuntabel, dan transparan. Melalui laporan ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih baik mengenai langkah-langkah yang telah diambil dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan organisasi dan akuntabilitas kinerja. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Padang, 31 Januari 2026

**KEPALA BIRO
PENGADAAN BARANG DAN JASA**



CERRY M. ST. MM
NIP. 19761016 200812 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja selama tahun 2025. Laporan ini merangkum hasil dari tiga sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa, meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan organisasi.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang berada di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan, bertugas untuk merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro ini mengalami beberapa tantangan, seperti kualitas SDM yang belum optimal, pengelolaan pengadaan yang belum sepenuhnya efisien, dan pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik yang perlu ditingkatkan.

Namun, pencapaian kinerja yang diperoleh sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 113,15%. Secara khusus, Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) mencapai nilai 94,15, melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, nilai akuntabilitas kinerja organisasi juga mencapai 101,21%, dan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tercatat sebesar 103,75%.

Laporan ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan yang dihadapi dalam mencapai target, termasuk perubahan regulasi yang cepat dan kurangnya disiplin SDM dalam pelaksanaan pengadaan. Upaya perbaikan telah dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan peran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), serta peningkatan pemanfaatan e-purchasing.

Sebagai langkah strategis ke depan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa akan fokus pada peningkatan penggunaan e-purchasing dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, serta terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pengadaan. Dengan demikian, Biro ini berharap dapat terus mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga untuk perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang, serta sebagai alat evaluasi bagi seluruh pihak terkait dalam mencapai tujuan yang lebih baik di sektor pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN ORGANISASI	1
1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.1.3 Struktur Organisasi	5
1.1.4 Sumber daya Manusia	5
1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	9
1.3 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 TUJUAN DAN SASARAN OPD	13
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	18
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	19
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.3.1 Sasaran Strategis 1	21
3.3.2 Sasaran Strategis 2	10
3.3.3 Sasaran Strategis 3	16
3.4 Realisasi Anggaran	23
3.5 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
BAB IV PENUTUP	27
4.1 Kesimpulan	27
4.2 Saran	28

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Keadaan Pegawai menurut Jenjang Pendidikan	6
Tabel I-2 Keadaan Pegawai menurut Jenjang Jabatan	7
Tabel I-3 Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin	8
Tabel I-4 Keadaan Pegawai menurut Golongan	8
Tabel I-5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..	11
Tabel II-1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Dan Target Tahun 2021-2026	14
Tabel II-2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	15
Tabel II-3 Tabel Perbandingan Anggaran Awal dan Perubahan Tahun 2025	15
Tabel III-1 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
Tabel III-2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2025	23
Tabel III-3 Perbandingan Capaian ITKP Tahun 2024 dan 2025	1
Tabel III-4 Perkembangan nilai ITKP dari tahun 2021-2025	2
Tabel III-5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2025	8
Tabel III-6 Trend Hasil Pengukuran pencapaian target Indikator Kinerja Tahun 2021-2025	9
Tabel III-7 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	11
Tabel III-8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025	12
Tabel III-9 Capaian Hasil Evaluasi Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Kriteria Penilaian	13
Tabel III-10 Nilai Interval Konversi	18
Tabel III-11 Hasil survey Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2025	19
Tabel III-12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2025	20
Tabel III-13 Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Pada	22
Tabel III-14 Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa	24

DAFTAR DIAGRAM

Diagram I-1 Keadaan pegawai menurut Jenjang Pendidikan	6
Diagram I-2 Keadaan pegawai menurut Jenjang Jabatan	7
Diagram I-3 Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin	8
Diagram I-4 Keadaan Pegawai menurut Golongan	9
Diagram III-1 Trend Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2021-2025	10
Diagram III-2 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro PBJ	14
Diagram III-3 Capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar III-1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	18
Gambar III-2 Penilaian Finansial Indeks Tata kelola Pengadaan tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat	23
Gambar III-3 Tangkapan Layar Aplikasi Sepakat.....	17

DAFTAR LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERJANJIAN KINERJA & RKT
CROSSCUTTING
MATRIKS LHE
SURVEY IKM 2024 & 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN ORGANISASI

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kab/Kota, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, maka ditetapkanlah Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu dari sembilan Biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang berkedudukan dibawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Paragraf 2 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 26 , Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Biro Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari 3 (tiga) Bagian dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- c. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Bagian adalah sebagai berikut:

a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- i) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- ii) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i), Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki fungsi sebagai berikut

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- i) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- ii) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i), Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai fungsi sebagai berikut :
 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa;

3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

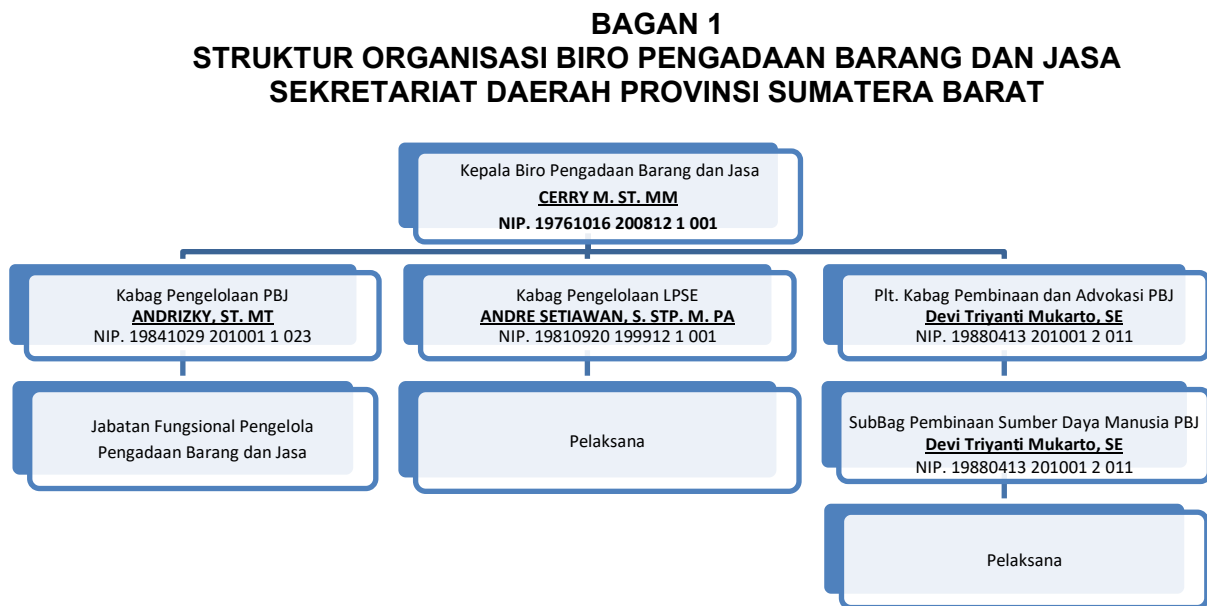
- i) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.
- ii) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i), Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi sebagai berikut :
 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa;
 3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa,

Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa;

4. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

1.1.3 Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :



1.1.4 Sumber daya Manusia

Saat ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah pegawai sebanyak 60 (enam puluh) orang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) keadaan, yaitu :

- 1) Keadaan pegawai menurut Jenjang Pendidikan :

Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel mulai dari jenjang Pendidikan tertinggi sampai terendah, sebagai berikut :

Tabel I-1 Keadaan Pegawai menurut Jenjang Pendidikan

	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
	S3	-	-
	S2	14	23,33
	S1	38	63,33
	D4	-	-
	D3	4	6,67
	D2	-	-
	D1	-	-
	SMA	4	6,67
	SMP	-	-
	SD	-	-
	Jumlah	60	

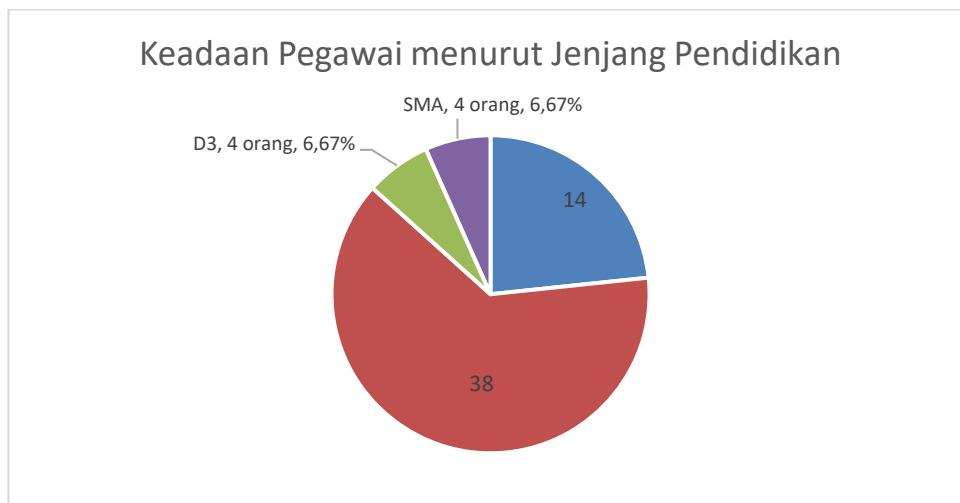


Diagram I-1 Keadaan pegawai menurut Jenjang Pendidikan

2) Keadaan Pegawai menurut jenjang Jabatan

Keadaan pegawai menurut jenjang jabatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel I-2 Keadaan Pegawai menurut Jenjang Jabatan

No.	Jabatan/Eselon	Jumlah	Golongan						Persentase (%)
			I	II	III	IV	VII	IX	
1	Struktural:	4	-	-	1	3	-	-	
	2) Eselon I		-	-	-	-	-	-	
	3) Eselon II	1	-	-	-	1	-	-	1,67
	4) Eselon III	2	-	-	-	2	-	-	3,33
	5) Eselon IV	1	-	-	1	-	-	-	1,67
2	Fungsional PPBJ :	39	-	-	25	11	-	3	
	Ahli Madya	2	-	-		2	-		3,33
	Ahli Muda	16	-	-	11	5	-		26,67
	Ahli Pertama	21	-	-	14	4	-	3	35,00
3	Pranata Komputer Terampil	1	-	-	-	-	1	-	1,67
4	Staf (Fungsional Umum)	12	-	4	8	-	-	-	20,00
5	Non ASN (Kontrak)	4	4	-	-	-	-	-	6,67
Jumlah		60	4	4	33	14	1	3	100.00

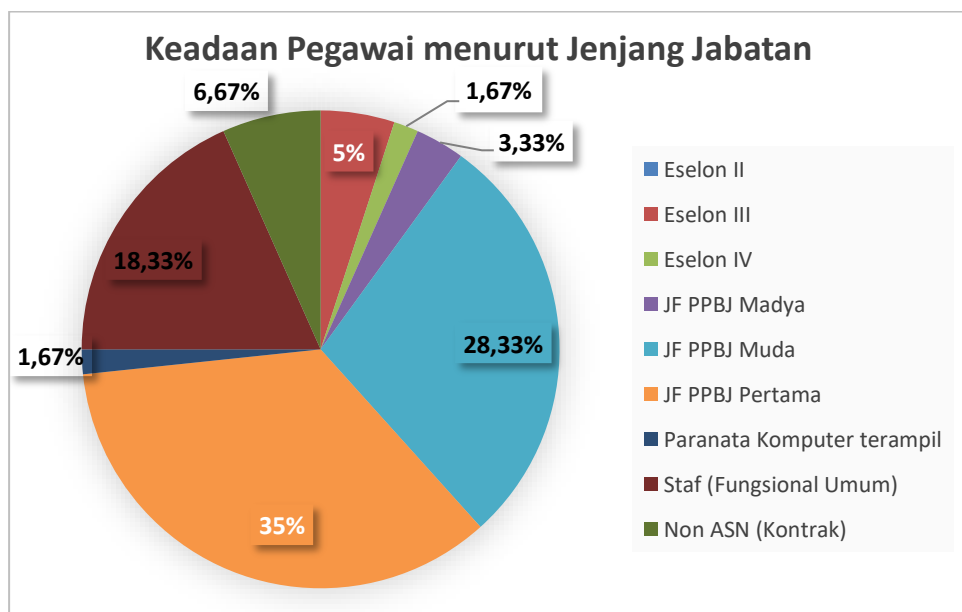


Diagram I-2 Keadaan pegawai menurut Jenjang Jabatan

3) Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin, tertuang dalam tabel dan diagram berikut :

Tabel I-3 Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin

	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
	Laki-laki	37	61,67
	Perempuan	23	38,33
	Jumlah	60	100

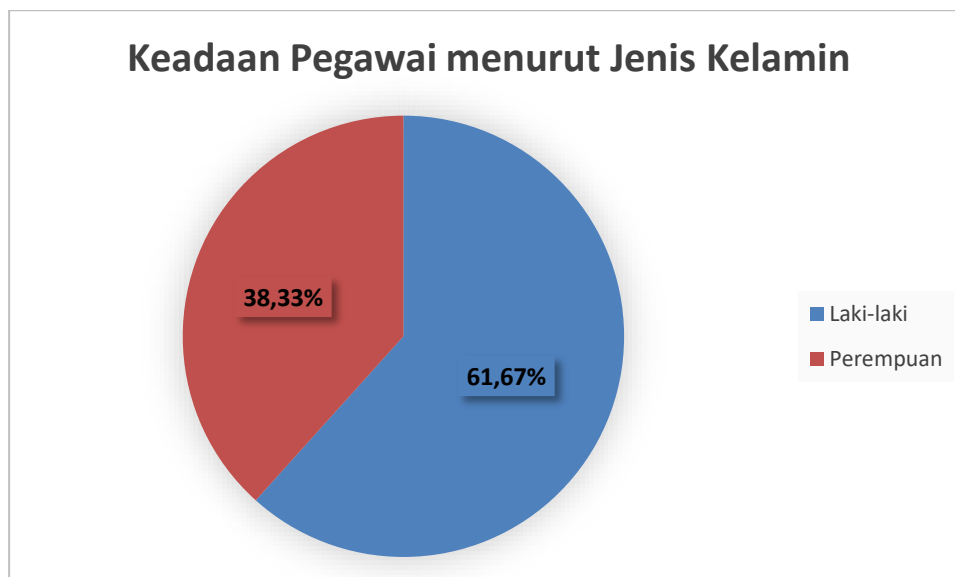


Diagram I-3 Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin

4) Keadaan Pegawai Menurut Golongan

Keadaan pegawai menurut golongan tertuang pada tabel dan diagram berikut :

Tabel I-4 Keadaan Pegawai menurut Golongan

	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
	Golongan I	-	-
	Golongan II	4	6,67
	Golongan III	40	66,67
	Golongan IV	8	13,33
	Golongan VII (PPPK)	1	1,67
	Golongan IX (PPPK)	3	5,00
	Non ASN (Kontrak)	4	6,67
	Jumlah	60	100

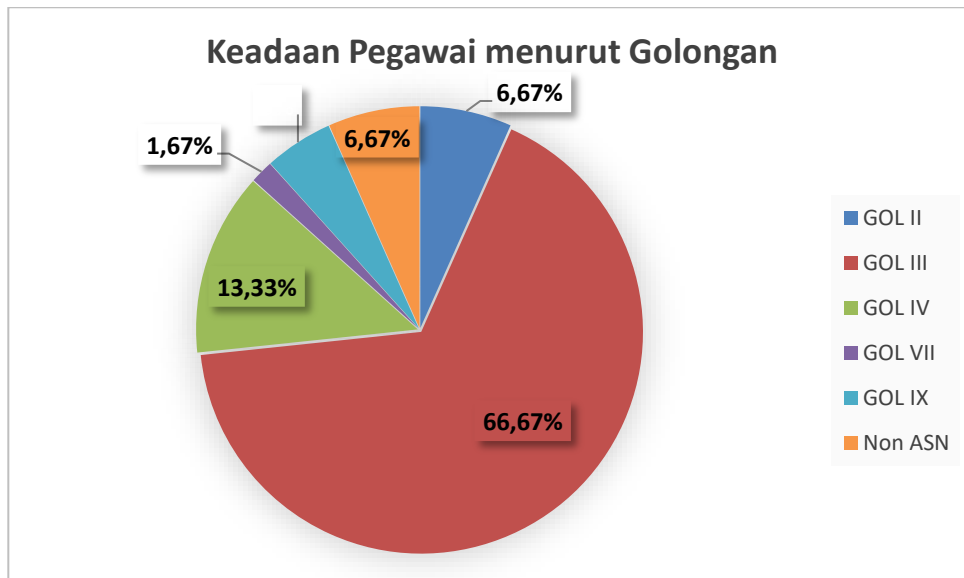


Diagram I-4 Keadaan Pegawai menurut Golongan

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai peran sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan daerah dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;

Disamping peranan Biro Pengadaan Barang dan Jasa di atas, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik juga memiliki fungsi layanan pengadaan dalam bentuk *system provider* yang bertindak sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai perangkat daerah yang menjadi perpanjangan tangan LKPP Republik Indonesia di daerah dan pelaksanaan fungsi koordinasi dengan

UKPBJ Kabupaten/Kota secara umum mendukung pencapaian visi dan misi LKPP Republik Indonesia.

1.3 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Perumusan isu-isu strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; (2) gambaran pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra LKPP Republik Indonesia;

Review singkat dari aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu-isu strategis yang telah disajikan dalam subbab-subbab sebelumnya sebagai berikut:

1. Permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan pembangunan dengan penyelenggaraan urusan perencanaan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- a. Belum memadainya kualitas SDM Pengadaan terkait Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Belum optimalnya tata kelola terkait pengadaan barang dan jasa; dan
- c. Belum optimalnya modernisasi pengadaan barang dan jasa melalui pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

**Tabel I-5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa belum berjalan secara optimal	Belum memadai kualitas SDM Pengadaan terkait Pengadaan Barang dan Jasa	Kualitas kompetensi SDM fungsional pengadaan masih belum sesuai analisis kebutuhan pegawai, sehingga masih memerlukan peningkatan kompetensi.
		ASN yang baru bergabung baik melalui perpindahan jabatan maupun rekrutmen CPNS belum memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang yang memadai.
		Pelaku pengadaan di luar UKPBJ (PA/ KPA/ PPK/ PPTK) belum memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan
		Rencana pengembangan SDM melalui pelatihan dan Pendidikan belum memadai
		Belum pastinya pelayanan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa, sehingga menyebabkan keengganan personil untuk terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah
	Belum optimalnya tata kelola terkait	Sering terjadinya perubahan aturan terkait pengadaan barang/jasa

	pengadaan barang dan jasa	Belum terjadinya harmonisasi aturan pengadaan barang/jasa dengan aturan terkait lainnya
		Belum dilibatkannya UKPBJ dalam proses perencanaan dan persiapan pengadaan barang/jasa sehingga menjadi kendala dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa
		Masih rendahnya Komitmen untuk mendukung pembentukan UKPBJ yang memenuhi standar maturitas dan pembentukan SDM PBJ sesuai dengan kebutuhan organisasi
		Masih belum terselenggaranya <i>e-purchasing</i> secara ideal dalam hal ini belum optimalnya penggunaan e-katalog dan toko daring
	Belum optimalnya modernisasi pengadaan barang dan jasa melalui pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Kualitas penyelenggaraan dukungan pengadaan barang/jasa masih kurang optimal karena masih perlu pengembangan sistem informasi yang komprehensif oleh LKPP
		Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai untuk pengembangan sistem informasi pendukung pengadaan barang dan jasa
		Sistem pengadaan secara elektronik belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh Perangkat Daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN OPD

Rencana strategi (Renstra) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Tugas dan Fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Sumatera Barat yang terkait langsung dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah adalah pada Misi 7 (tujuh) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas” sebagai pendukung pada sasaran terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Dengan tujuan yaitu meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa serta indikator kinerja indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa minimal baik.

Sejalan dengan Visi dan Misi diatas, Biro PBJ memiliki tujuan meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel, serta berkualitas pada sektor pengadaan barang dan jasa dengan sasaran meningkatnya pencapaian tingkat kematangan UKPBJ. Dimana untuk mencapai tingkat kematangan UKPBJ tersebut memiliki beberapa variabel :

1. Tingkat Kematangan UKPBJ
2. Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ
3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Adapun tujuan dan sasaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah serta melaksanakan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam mencapai tujuan tersebut diterjemahkanlah sasaran-sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya tata kelola Pengadaan barang dan Jasa
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

Untuk melihat secara detail keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Dan Target Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal baik	91	93	93	97	97	97	97
Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (66,24)	B (66,25)	B (69,25)	BB (70,45)	BB (75,30)	A (92,65)	A (92,65)
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	0	B (77)	B (80)	B (85)	A (90)	A (96)	A (96)

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, maka dibuatlah Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat awal Tahun 2025. Adapun pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja dimaksud adalah sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel II-2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Biro Pengadaan Barang Dan Jasa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata kelola Pengadaan Minimal Baik	70
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB (70)
3.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	A (80)

Tabel II-3 Tabel Perbandingan Anggaran Awal dan Perubahan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	936,888,566	993,613,566	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,020,000	1,020,000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,020,000	1,020,000	
1.2	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	16,500,000	16,500,000	
1.2.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16,500,000	16,500,000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000	10,000,000	
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,000,000	10,000,000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	548,440,432	647,704,532	
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,411,500	5,115,000	
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,771,200	53,642,300	
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,263,000	7,588,000	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	507,994,732	581,359,232	
1.5	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	31,410,900	
1.5.1	Pengadaan Mebel	0	1,000,000	

1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	30,410,900	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200,008,134	200,008,134	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	370,000	370,000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199,638,134	199,638,134	
1.7	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57,960,000	86,970,000	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45,895,000	62,340,000	
1.7.2	Pemeliharaan Mebel	250,000	1,000,000	
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,815,000	23,630,000	
2	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	292,150,000	335,425,000	
2.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	37,240,00	54,785,000	
2.1.1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	31,140,000	48,685,000	
2.1.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	3,660,000	3,660,000	
2.1.3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2,440,000	2,440,000	
2.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	216,660,000	216,660,000	
2.2.1	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	214,220,000	214,220,000	
2.2.2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1,220,000	1,220,000	
2.2.3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1,220,000	1,220,000	
2.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	38,250,000	63,980,000	
2.3.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	15,870,000	10,210,000	
2.3.2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	10,210,00	44,150,000	
2.3.3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jas	12,170,000	9,620,000	
Total Anggaran		1,229,038,566	1,329,038,566	

Perbedaan antara target PK yang lebih rendah dari Target Renstra, dikarenakan target yang ditetapkan mempertimbangkan perencanaan

Strategis, Dokumen RKT 2025 dan Pencapaian kinerja tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut

1. Perbedaan target ITKP :
 - a. RPJMD Provinsi Sumatera Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 9 September 2021. Penetapan target ITKP Tahun 2023 sebesar 93 yang tertera pada dokumen RPJMD dan Renstra Biro PBJ, menggunakan proyeksi berdasarkan indikator Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi tanggal 19 April 2021
 - b. Pada tanggal 1 Desember 2021 terbit Surat Edaran Kepala LKPP RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi, dengan indikator penilaian yang berbeda dari sebelumnya.
 - c. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan pengurangan nilai target pada Perjanjian Kinerja (PK) 2024 sesuai perhitungan LKPP RI yang baru, dari target 93 menjadi 73. Namun jika nilai capaian ITKP 2024 dikonversikan menurut perhitungan sesuai RPJMD dan Renstra, maka capaian nilai sebesar 91,80 berubah menjadi 95 (melebihi target RPJMD dan Renstra).
2. Untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Biro PBJ tahun 2025 adalah sebesar BB (70) pada Perjanjian Kinerja (PK). Dimana nilai ini terjadi perubahan yang awal B(66,32) diganti menjadi BB(70) berdasarkan hasil pembahasan dan verifikasi Dokumen SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 dengan Biro Organisasi untuk menyamakan target Akuntabilitas Kinerja Organisasi Biro PBJ dengan Renstra.
3. Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi, Target Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi tahun 2024 adalah sebesar 92 yang melebihi dengan target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 85. Perubahan nilai target ini juga berdasarkan hasil pembahasan dan verifikasi Dokumen SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 dengan Biro Organisasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria berikut ini:

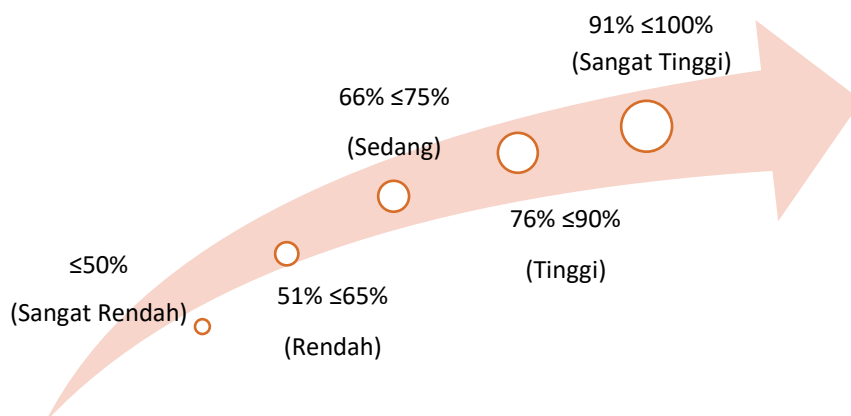
1. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times Target) - Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Gambar III-1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \right) \times 50$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 tergambar dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan tersebut selaras dan mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Barat. Pencapaian indikator kinerja 3 (tiga) Sasaran Strategis dimaksud adalah sebagaimana disajikan pada **Tabel III-1 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025**.

Tabel III-1 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata kelola Pengadaan Minimal Baik	70	94,15	134,50%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70)	BB (70,85)	101,21 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	A (80)	A (83)	103,75 %
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					113,15%

Berdasarkan data pada **Tabel III-1 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025** diatas, hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) Sasaran Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 menunjukan rata-rata persentase capaian indikator kinerja adalah 113,15% dengan kategori **Sangat Baik**, adapun sasaran dengan capaian tertinggi adalah 134,50% dimana realisasi dari sasaran ini merujuk pada nilai ITKP Tahun 2024, sedangkan sasaran dengan capaian terendah adalah 101,21%

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2021-2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja pertahun. Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran.

3.3.1 Sasaran Strategis 1



SASARAN STRATEGIS 1 **MENINGKATNYA TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA**

INDIKATOR : MENINGKATNYA TATA KELOLA PENGADAAN
BARANG DAN JASA

Tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu sistem yang mengatur keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengadaan agar berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata kelola ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta optimalisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa berperan sebagai pusat pembinaan dan pengendalian pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah, yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh perangkat daerah.

Hal yang melatarbelakangi perlunya peningkatan tata kelola pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu sasaran Perangkat Daerah.

Peningkatan tata kelola pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sasaran Perangkat Daerah karena pengadaan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah serta pengelolaan anggaran. Tata kelola yang belum optimal berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaksanaan, rendahnya kualitas hasil pengadaan, serta risiko administratif dan hukum. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pengadaan diperlukan untuk mewujudkan proses pengadaan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Untuk mengetahui ketercapaian tata kelola pengadaan barang dan jasa digunakan indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan. Indikator ini diukur berdasarkan Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan.

Pada tahun 2025, mengacu pada Renstra/hasil penyesuaian realisasi tahun 2024, Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan ditargetkan sebesar 70. Pencapaian Sasaran meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa dapat dilihat pada **Tabel III-1 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025**.

3.3.1.1 Penetapan Target Kinerja

Perbedaan antara target PK yang lebih rendah dari Target Renstra, dikarenakan target yang ditetapkan mempertimbangkan perencanaan Strategis, Dokumen RKT 2025 dan Pencapaian kinerja tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. RPJMD Provinsi Sumatera Barat ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 9 September 2021. Pada dokumen tersebut, termasuk dalam Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa, target Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) semula dinyatakan dalam bentuk persentase, dengan target Tahun 2023 sebesar 93%. Penetapan tersebut menggunakan proyeksi indikator berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi tanggal 19 April 2021
- b. Selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2021 diterbitkan Surat Edaran Kepala LKPP RI Nomor 4 Tahun 2021 dengan substansi yang sama, namun menggunakan indikator penilaian yang berbeda dari ketentuan sebelumnya. Perubahan tersebut mengakibatkan metode pengukuran ITKP tidak lagi menggunakan persentase, melainkan menggunakan skala nilai berbasis tabel Likert dengan kategori capaian, dimana nilai minimal **Baik** berada pada skor 70.
- c. Sehubungan dengan perubahan metode pengukuran tersebut, maka dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 sesuai dengan perhitungan terbaru LKPP RI, dari target semula pada

dokumen RPJMD dan Renstra tahun 2025 sebesar 97% menjadi target nilai 70 dengan kategori Baik.

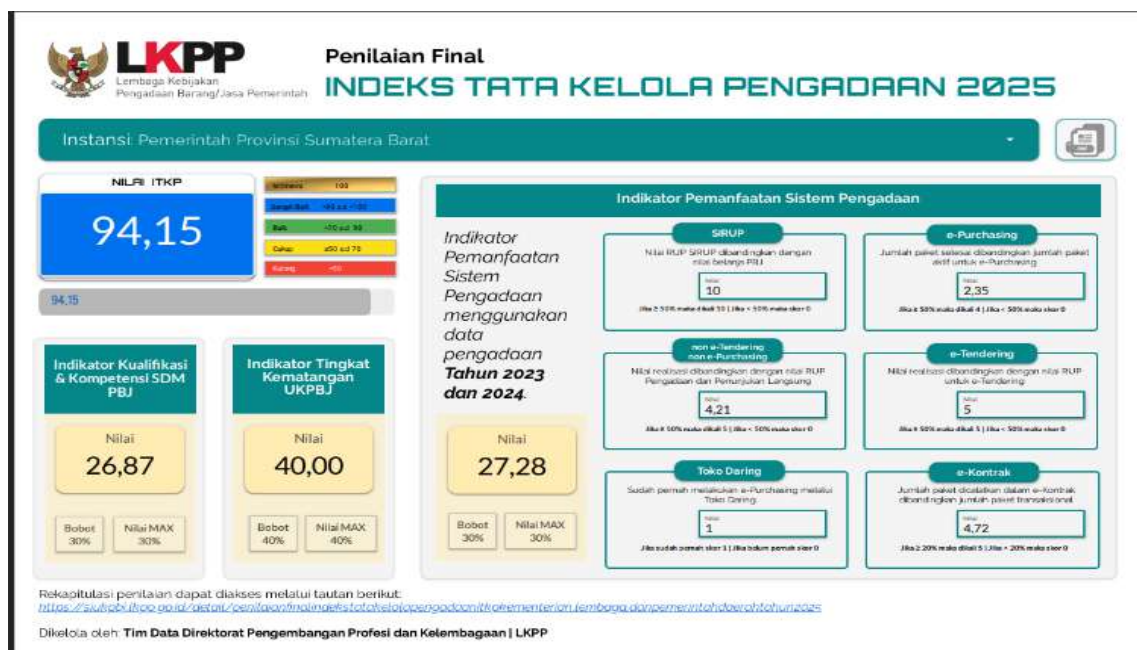
3.3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan

Biro Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan target untuk Indeks tata kelola pengadaan sebesar 70 dan didapatkan realisasi sebesar 94,15. Dengan persentase capaian sebesar 134,50%. Dimana nilai ini termasuk pada kategori keberhasilan sangat baik. Realisasi ITKP sebesar 94,15 di tahun 2025 diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam SE Kepala LKPP Nomor 5 tahun 2025.

Tabel III-2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	70	94,15	134,50

Gambar III-2 Penilaian Finas Indeks Tata kelola Pengadaan tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat



3.3.1.3 Perbandingan antara realisasi pencapaian ITKP dengan pencapaian ITKP tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025 dengan Tahun 2024 terdapat peningkatan nilai realisasi ITKP dari 91,80 menjadi 94,15. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi ITKP pada tahun 2025 mencapai nilai 94,15. Capaian tersebut telah melampaui target ITKP tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 70 sesuai dengan perubahan PK pada tahun 2025. Untuk tahun 2026 Biro Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan target nilai ITKP sesuai dengan Renstra 2025-2030 adalah 71.

Indikator dan formula penilaian ITKP sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi yang sebelumnya diukur sampai dengan Tahun 2024, juga digunakan untuk Tahun 2025, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2025 Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Sebagai Aspek Indikator Meso Dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

Berdasarkan SE Kepala LKPP Nomor 5 tahun 2025, indikator penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN : SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PENILAIAN INDEKS
TATA KELOLA PENGADAAN SEBAGAI ASPEK
INDIKATOR MESO DALAM INDEKS
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2025

NOMOR : 5 TAHUN 2025

TANGGAL : 31 Desember 2025

Tabel Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2025

NO	NAMA INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	FORMULA	METODE PENILAIAN	BOBOT					PENILAIAN DAN PENARIKAN DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	
A. Pemanfaatan Sistem Pengadaan											
1	SIRUP	a. K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP ≥ 50% s.d 100% b. K/L/PDK/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk	a = sesuai persentase RUP SiRUP b = 0	Nilai x Bobot	Data tarikan dari sirup.lkpp.go.id	10%	10%	10%	10%	10%	Data yang digunakan untuk penilaian adalah data tahun anggaran berjalan yang ditarik setiap 1 April.

NO	NAMA INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	FORMULA	METODE PENILAIAN	BOBOT					PENILAIAN DAN PENARIKAN DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	
		mengumumkan RUP dengan nilai RUP < 50%									
2	E-Tendering	a. K/L/Pemda menerapkan $\geq 50\%$ <i>E-Tendering</i> (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP b. K/L/Pemda menerapkan < 50% <i>E-Tendering</i> (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP	a = sesuai persentase capaian b = 0	Persentase dari nilai pagu <i>E-Tendering</i> (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu <i>E-Tendering</i> (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.	Data Warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari SPSE di seluruh Indonesia	20%	5%	5%	5%	5%	Penilaian dilakukan untuk data nilai pagu paket pada SPSE dan data nilai pagu paket pada SiRUP tahun sebelumnya. Penarikan data dilakukan pada 31 Desember, yaitu setiap akhir tahun anggaran dimana selesainya transaksi pengadaan di SPSE.
3	E-purchasing	E-Purchasing Katalog: a. K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga paket selesai $\geq 50\%$ pada aplikasi Katalog Elektronik b. K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket	a = sesuai persentase capaian b = 0	Jumlah Paket Selesai : Jumlah Paket Aktif x 100%	Database pada Katalog Elektronik	-	5%	4%	4%	4%	Penilaian dilakukan untuk status data tanggal 1 Januari – 31 Desember tahun sebelumnya hingga 31 Januari tahun berjalan. Penarikan data dilakukan pada

NO	NAMA INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	FORMULA	METODE PENILAIAN	BOBOT					PENILAIAN DAN PENARIKAN DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	
		hingga status paket selesai < 50% pada aplikasi Katalog Elektronik									31 Januari tahun berjalan.
		E-Purchasing Toko Daring: a. K/L/Pemda sudah melakukan <i>E-Purchasing</i> melalui Toko Daring b. K/L/Pemda belum melakukan <i>E-Purchasing</i> melalui Toko Daring	a = 100% b = 0%	K/L/Pemda yang sudah melaksanakan <i>E-Purchasing</i> melalui Toko daring	Database pada Toko Daring	-	-	1%	1%	1%	
4	Non E-Tendering dan Non E-Purchasing	a. K/L/Pemda sudah menerapkan $\geq 50\%$ <i>Non E-Tendering & Non E-Purchasing</i> (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP b. K/L/Pemda sudah menerapkan < 50% <i>Non E-Tendering & Non E-Purchasing</i> (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP	a = sesuai persentase capaian b = 0	Persentase dari data <i>Non E-Tendering & Non E-Purchasing</i> (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data <i>Non E-Tendering & Non E-Purchasing</i> (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.	Data Warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari SPSE di seluruh Indonesia	-	5%	5%	5%	5%	Penilaian dilakukan untuk data nilai pagu paket pada SPSE dan data nilai pagu paket pada SiRUP tahun sebelumnya. Penarikan data pada 31 Desember, yaitu setiap akhir tahun anggaran dimana selesainya transaksi pengadaan di SPSE.

NO	NAMA INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	FORMULA	METODE PENILAIAN	BOBOT					PENILAIAN DAN PENARIKAN DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	
5	E-Kontrak	a. K/L/Pemda menerapkan $\geq 20\%$ E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE b. K/L/Pemda menerapkan $< 20\%$ E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE	a = sesuai persentase capaian b = 0	Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pilihannya pada aplikasi SPSE.	Data Warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari SPSE di seluruh Indonesia	-	5%	5%	5%	5%	Penilaian dilakukan untuk data nilai pagu paket pada SPSE dan data nilai pagu paket pada SiRUP tahun sebelumnya. Penarikan data pada 31 Desember, yaitu setiap akhir tahun anggaran dimana selesainya transaksi pengadaan di SPSE.
B. Kualifikasi dan Kompetensi SDM		1) Bagi Instansi yang wajib memiliki JF PPBJ: $\text{= Keterisian JF PPBJ} \times \text{bobot}$ Contoh Perhitungan: Provinsi ABC sudah menghitung kebutuhan JF PPBJ, dan mendapat rekomendasi kebutuhan dari LKPP sebanyak 60 JF PPBJ. Hingga 30 Oktober 2021 Provinsi ABC sudah mengangkat 42 JF PPBJ dan semua salinan SK pengangkatan JF PPBJ sudah disampaikan ke LKPP. - Persentase keterisian JF PPBJ = $(42/60) \times 100\% = 70\%$ - Keterisian JF PPBJ = 70 - Nilai indikator kualifikasi dan kompetensi SDM Provinsi ABC untuk tahun 2021 = $70 \times 30\% = 21$			1) Database salinan SK Pengangkatan JF PPBJ yang disampaikan/ ditembuskan ke LKPP; dan 2) Surat rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari LKPP.	30%	30%	30%	30%	30%	Penilaian dilakukan untuk data tahun berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

NO	NAMA INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	FORMULA	METODE PENILAIAN	BOBOT					PENILAIAN DAN PENARIKAN DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	
		2) Bagi Instansi yang masuk dalam pengecualian tahun 2022 dan 2023: Keterisian Personel Lainnya yang Bersertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Dasar/Level-1 = x bobot			1) <i>Database</i> Personel Lainnya yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Dasar/Level-1; dan 2) Surat rekomendasi kebutuhan Personel Lainnya dari LKPP.	30%	30%	30%	30%	30%	Penilaian dilakukan untuk data tahun berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Oktober tahun berjalan.
		3) Bagi Instansi yang masuk dalam pengecualian, untuk tahun 2024 dan 2025: Keterisian Personel Lainnya yang Bersertifikat Kompetensi = x bobot			1) <i>Database</i> Personel Lainnya yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi; dan 2) Surat rekomendasi kebutuhan Personel Lainnya dari LKPP.	30%	30%	30%	30%	30%	Penilaian dilakukan untuk data tahun berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Oktober tahun berjalan.
C.	Tingkat Kematangan UKPBJ	Bagi K/L/Pemda yang diwajibkan dalam pembentukan UKPBJ: Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan level Proaktif dibandingkan dengan	Nilai Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ = (Capaian Kematangan Proaktif : Jumlah Variabel) x Bobot Indikator. Ilustrasi: Jika UKPBJ Kab A telah memenuhi 4 variabel di level Proaktif dari 9 variabel keseluruhan, maka		Tarikan data dari aplikasi SIMKU yang diakses melalui https://www.siukpbj.lkpp.go.id	40%	40%	40%	40%	40%	Penilaian dilakukan untuk data tahun berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

NO	NAMA INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	FORMULA	METODE PENILAIAN	BOBOT					PENILAIAN DAN PENARIKAN DATA																					
						2021	2022	2023	2024	2025																						
		jumlah keseluruhan variabel (9 variabel) dikalikan dengan bobot indikator Bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ: Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ tidak digunakan dalam proses penilaian. Penghitungan Indeks Tata Kelola dihitung dari indikator lain dengan perhitungan secara proporsional dimana nilai Indeks Tata Kelola maksimal tetap 100.	pada tahun 2021 Nilai Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ Kab A = $(4 : 9) \times 40 = 17,78$. Perhitungan Nilai untuk masing-masing capaian kematangan UKPBJ sebagai berikut: <table><tr><th>Capaian Kematangan</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>9/9</td><td>40,00</td></tr><tr><td>8/9</td><td>35,56</td></tr><tr><td>7/9</td><td>31,11</td></tr><tr><td>6/9</td><td>26,67</td></tr><tr><td>5/9</td><td>22,22</td></tr><tr><td>4/9</td><td>17,78</td></tr><tr><td>3/9</td><td>13,33</td></tr><tr><td>2/9</td><td>8,89</td></tr><tr><td>1/9</td><td>4,44</td></tr><tr><td>0/9</td><td>0,00</td></tr></table>	Capaian Kematangan	Nilai	9/9	40,00	8/9	35,56	7/9	31,11	6/9	26,67	5/9	22,22	4/9	17,78	3/9	13,33	2/9	8,89	1/9	4,44	0/9	0,00							
Capaian Kematangan	Nilai																															
9/9	40,00																															
8/9	35,56																															
7/9	31,11																															
6/9	26,67																															
5/9	22,22																															
4/9	17,78																															
3/9	13,33																															
2/9	8,89																															
1/9	4,44																															
0/9	0,00																															

Dengan capaian nilai ITKP sebesar 94,15 ini, kinerja tata kelola pengadaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak hanya telah memenuhi standar nasional, tetapi juga berada pada kategori *Sangat Baik*.

Tabel berikut menggambarkan capaian masing-masing indikator pembentuk Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2024 dan Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Secara umum terdapat peningkatan capaian pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024, terutama pada indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan, sementara indikator lainnya relatif stabil dan telah mencapai nilai maksimal.

Tabel III-3 Perbandingan Capaian ITKP Tahun 2024 dan 2025

Indikator	Bobot	Nilai Max	Pencapaian	
	%	%	2024	2025
Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	30	30	26.87	26.87
Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	40	40	40	40
Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	30	30	24.93	27.28
- SiRUP	10	10	10	10
- E-Purchasing	4	4	0	2.35
- E-Tendering	5	5	5	5
- non e-tendering , non e-Purchasing	5	5	4.21	4.21
- Toko Daring	1	1	1	1
- e-Kontrak	5	5	4.72	4.72

Terjadi peningkatan nilai pada Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan dari 24,93 pada Tahun 2024 menjadi 27,28 pada Tahun 2025 atau meningkat sebesar 2,35 poin. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan pada sub-indikator E-Purchasing, yang pada Tahun 2024 belum menunjukkan capaian (0), kemudian meningkat menjadi 2,35 pada Tahun 2025.

Peningkatan ini merupakan dampak dari kebijakan kewajiban penggunaan e-purchasing sebagai salah satu strategi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Implementasi kebijakan tersebut mendorong perangkat daerah untuk lebih mengoptimalkan

pemanfaatan katalog elektronik dalam proses pengadaan, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai indikator pemanfaatan sistem pengadaan secara keseluruhan.

Selain itu, sub-indikator lain seperti E-Tendering, non e-tendering/non e-purchasing, Toko Daring, dan e-Kontrak relatif stabil, sehingga kenaikan agregat indikator lebih dominan berasal dari peningkatan penggunaan e-purchasing.

3.3.1.4 Perkembangan nilai ITKP dengan tahun sebelumnya

Tabel III-4 Perkembangan nilai ITKP dari tahun 2021-2025

No	Tahun	Nilai ITKP	Kategori*	Keterangan
1	2021	48,91	Kurang	Mengacu pada SE Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2021
2	2022	73,70	Baik	Mengacu pada SE Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2021
3	2023	84,74	Baik	Mengacu pada SE Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2021
4	2024	91,80	Sangat Baik	Mengacu pada SE Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2021
5	2025	94,15	Sangat Baik	Mengacu pada SE Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Dalam rangka mendorong capaian indikator pemanfaatan sistem pengadaan telah dilaksanakan:
 - 1) Pendampingan kepada OPD melalui kunjungan langsung Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersama Kepala Bagian dan staf terkait dalam rangka meningkatkan SDM pengadaan barang dan jasa pada Perangkat Daerah.
 - 2) Melakukan monitoring berkala terhadap capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik pada OPD baik melalui surat maupun pertemuan langsung.

- 3) Melakukan penugasan PIC (Person In Charge) atau Penanggung Jawab untuk masing-masing OPD terkait permasalahan lingkup pengadaan barang dan jasa sehingga lebih memudahkan koordinasi serta percepatan penanganan permasalahan.
- b. Dalam rangka mendorong capaian indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ telah dilakukan pembinaan SDM pengadaan barang dan jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa secara rutin melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), kegiatan bimbingan teknis BARAJA PBJ setiap bulannya, maupun pengiriman fungsional PPBJ untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh berbagai pihak;
- c. Dalam rangka mendorong capaian indikator tingkat kematangan UKPBJ telah dilakukan penyusunan SOP dan pengembangan aplikasi pendukung pengadaan barang dan jasa diantaranya aplikasi Sistem Informasi Pengendalian (SIPEDAL) PBJ dan Sistem Administrasi Pengalaman Penyedia (SATALI).

3.3.1.5 Perbandingan nilai ITKP dengan Standar Nasional

Peringkat	Nama Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor ITKP	Predikat
1	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	10.00	5.00	5.00	3.61	1.00	4.74	29.35	29.10	40.00	98.45	Sangat Baik
2	Pemerintah Daerah Provinsi Bali	10.00	5.00	4.88	3.94	1.00	4.99	29.81	27.39	40.00	97.21	Sangat Baik
3	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	10.00	5.00	4.21	2.35	1.00	4.72	27.28	26.87	40.00	94.15	Sangat Baik
4	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	10.00	4.93	0.00	3.78	1.00	4.04	23.75	30.00	40.00	93.75	Sangat Baik
5	Pemerintah Daerah Provinsi Banten	10.00	5.00	3.99	3.42	1.00	4.13	27.54	26.09	40.00	93.63	Sangat Baik

Berdasarkan tabel, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat 3 dengan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebesar 94,15 dan predikat “Sangat Baik”. Capaian ini menunjukkan kinerja pengelolaan pengadaan barang/jasa yang sangat kuat, baik dari sisi pemanfaatan sistem maupun aspek kelembagaan dan sumber daya manusia.

Pada komponen sistem pengadaan, nilai SRUP mencapai 10,00 dan E-Tendering 5,00 yang menunjukkan optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan tender secara elektronik. Nilai Non e-Tendering/Non e-

Purchasing sebesar 4,21, E-Katalog 2,35, Toko Daring 1,00, serta e-Kontrak 4,72 menggambarkan bahwa transformasi digital pengadaan telah berjalan cukup baik dan relatif merata di berbagai metode.

Dari sisi indikator pemanfaatan sistem pengadaan, diperoleh nilai 27,28, yang menunjukkan tingkat penggunaan aplikasi pengadaan yang tinggi dan konsisten. Hal ini menjadi faktor penting dalam mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas proses pengadaan.

Sementara itu, indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ sebesar 26,87 serta indikator Kematangan UKPBJ sebesar 40,00 menunjukkan bahwa aspek kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia sudah berada pada level yang sangat baik. Kombinasi kinerja sistem dan kelembagaan tersebut menjadi faktor utama yang mendorong perolehan skor ITKP 94,15 dengan predikat “Sangat Baik”.

3.3.1.6 Hambatan Peningkatan Kinerja

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target,

- Perubahan regulasi yang cepat sehingga perlu pemahaman yang sama antar pelaku pengadaan.
- Masih terdapat perangkat daerah yang menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) belum sesuai dengan kondisi seharusnya.
- Kurangnya komitmen OPD dalam proses pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan yang sudah diinput pada aplikasi SiRUP.
- Masih belum disiplinnya SDM pengadaan barang dan jasa dalam menyelesaikan paket pengadaan melalui aplikasi SPSE.
- Pengembangan aplikasi e-Katalog dari versi 5 ke versi 6, hal ini menyebabkan perubahan cara kerja pelaku pengadaan barang dan jasa baik yang berada pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Perangkat Daerah maupun Penyedia Barang dan Jasa.

3.3.1.7 Upaya Peningkatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai upaya perbaikan tata kelola

pengadaan barang dan jasa secara berkelanjutan, antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan peran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai pusat keunggulan (Center of Excellence), melalui peningkatan kematangan kelembagaan UKPBJ, penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) pengadaan, serta optimalisasi fungsi layanan pengadaan terintegrasi.
2. Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa, dengan mendorong Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta melakukan revaluasi dan pendampingan perencanaan pengadaan.
3. Optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, melalui peningkatan pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), e-Katalog, dan aplikasi pendukung lainnya, guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pengadaan.
4. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia pengadaan, melalui fasilitasi sertifikasi, bimbingan teknis, pendampingan, serta penguatan peran pelaku pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Penguatan fungsi pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan, dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, termasuk identifikasi potensi permasalahan serta pemberian rekomendasi perbaikan kepada Perangkat Daerah.
6. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan pengadaan barang dan jasa, melalui sosialisasi kebijakan pengadaan terkini, penyampaian rekomendasi hasil evaluasi, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, dengan memastikan keterbukaan informasi pengadaan serta ketersediaan data dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam penilaian ITKP.

3.3.1.8 Analisa efesien penggunaan sumber daya

Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(1,329,038,566 \times 95,70\%) - 1,291,526,280}{1,329,038,566} \times 100\%$$
$$= -0.97$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{-0.97}{20}\right) \times 50$$
$$= -192.94\%$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Analisa Program Kegiatan

Untuk tahun 2025 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan 24 Kegiatan, sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Pengamanan Barang milik daerah SKPD;
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
6. penyediaan bahan logistik kantor;
7. penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
8. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
10. Pengadaan Mebel;
11. Penyediaan jasa surat menyurat;
12. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;

13. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
14. Pemeliharaan Mebel
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
16. Pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa;
17. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
18. Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
19. Pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik;
20. Pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
21. Pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
22. Pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa;
23. Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa;
24. Pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;

Pencapaian realisasi fisik dan keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA SKPD Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Target Fisik sebesar 100% dengan realisasi sebesar 95.7%
- Target Keuangan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 97.18%

Secara umum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak menghadapi kendala yang signifikan dalam pelaksanaan dan realisasi 24 subkegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA Tahun Anggaran 2025. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp37.512.286,00 yang berasal dari beberapa komponen belanja, yaitu Belanja Modal, belanja honorarium narasumber, belanja makan dan minum rapat, serta belanja pelatihan dan pemeliharaan mainframe.

Sisa anggaran pada Belanja Modal serta belanja makan dan minum rapat merupakan hasil efisiensi pelaksanaan kegiatan. Adapun sisa anggaran pada belanja honorarium narasumber disebabkan oleh penggunaan narasumber yang berasal dari internal OPD, sehingga pembayaran honorarium hanya dapat direalisasikan sebesar 50% sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, belanja pemeliharaan *mainframe* tidak

direalisasikan karena selama tahun anggaran berjalan tidak terdapat kerusakan pada perangkat *mainframe* yang memerlukan pemeliharaan.

3.3.1.9 Capaian Kinerja

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2025 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi (RB) adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Tiga sasaran RB 2020 – 2025 adalah:

- a) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
- b) Birokrasi yang Kapabel; dan
- c) Pelayanan Publik yang Prima.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2025, pelaksanaan RB terbagi atas tiga tingkatan, yaitu makro, meso dan mikro. Dimana pada Tingkat meso terkait pengadaan barang dan jasa diterjemahkan dalam bentuk Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Capaian untuk tahun 2025 Indeks Tata Kelola Pengadaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 mempunyai indikator sebagai berikut :

Tabel III-5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Target Renstra	% Renstra
1.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	70	94,15	134,50	70	134,50

Jika dilakukan perbandingan antara target dan realisasi ITKP didapatkan nilai persentase sebesar 134,5%

$$\begin{aligned} \text{Capaian kinerja 2025} &= \frac{94,15}{70} \times 100\% \\ &= 134,5\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Capaian target akhir Renstra} &= \frac{94,15}{70} \times 100 \% \\ &= 134,5\%\end{aligned}$$

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan pada tahun berjalan menunjukkan hasil yang sangat optimal. Dari target yang ditetapkan sebesar 70, realisasi yang dicapai mencapai 94,15 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 134,50%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola pengadaan telah melampaui target yang direncanakan secara signifikan.

Jika dibandingkan dengan target Renstra yang juga sebesar 70, realisasi kinerja tahun ini tetap berada jauh di atas sasaran jangka menengah dengan tingkat capaian terhadap Renstra sebesar 134,50%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya peningkatan tata kelola pengadaan yang dilakukan telah berjalan efektif, baik melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengadaan, pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, maupun peningkatan fungsi pembinaan dan koordinasi dengan perangkat daerah.

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah 134,5% dari target 2025 dan tercapai 134,5% dari target Renstra.

Selain itu Apabila dilihat dari *trend* kinerja terhadap sasaran ini dari tahun 2021 s.d 2025, terdapat peningkatan dari indikator kinerja ini :

Tabel III-6 Trend Hasil Pengukuran pencapaian target Indikator Kinerja Tahun 2021-2025

Indikator	Target				Realisasi				% Capaian			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	70	73	70	70	73,7	84,74	91,80	94,15	105,29	116,1	96,63	134,50

Dari Tabel III-6 Trend Hasil Pengukuran pencapaian target Indikator Kinerja Tahun 2021-2025 diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat di

penuhi dengan tingkat capaian 134,50% (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan *trend* realisasi dari tahun 2021 sampai 2025 indeks tata kelola pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mencapai target yang ditetapkan setiap tahun.

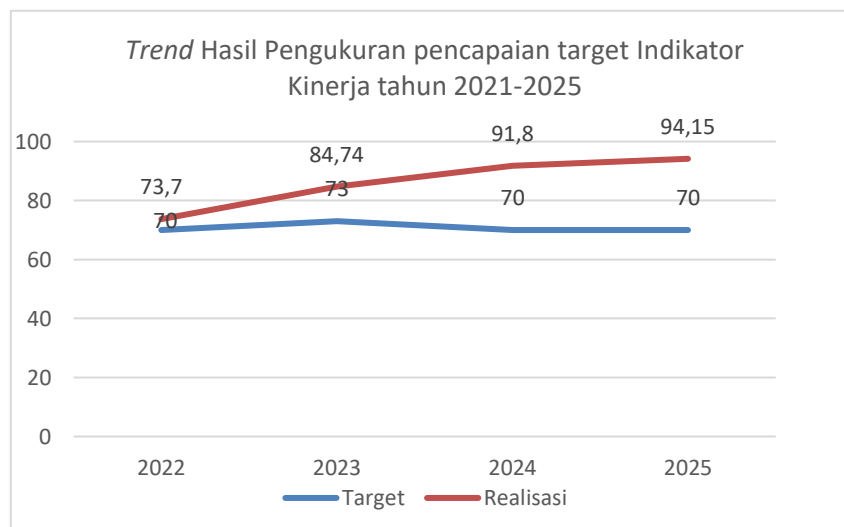


Diagram III-1 Trend Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2021-2025

3.3.2 Sasaran Strategis 2

	SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI INDIKATOR : NILAI AKUNTABILITAS KINERJA OPD
---	---

3.3.2.1 Capaian Kinerja

Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi yang baik diperlukan dalam rangka mendukung dan menentukan keberhasilan jalan organisasi, baik pengelolaan secara internal maupun eksternal. Untuk melihat keberhasilan akuntabilitas kinerja organisasi tersebut maka ditetapkan sasaran strategis. Gambaran pencapaian sasaran strategis tersebut dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja pada perjanjian kinerja sebelumnya yang diukur melalui satu (1) indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan nilai dan capaian pada tahun 2025.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dengan menilai beberapa komponen dasar manajemen kinerja yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30 %
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 %
4. Evaluasi Internal dengan bobot 25 %

Dengan hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen tersebut memberikan gambaran tingkat LAKIP dengan predikat penilaian.

Untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Biro PBJ tahun 2025 adalah sebesar BB (70) pada Perjanjian Kinerja (PK). Dimana nilai ini terjadi perubahan yang awal B(66,32) diganti menjadi BB(70) berdasarkan hasil pembahasan dan verifikasi Dokumen SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 dengan Biro Organisasi untuk menyamakan target Akuntabilitas Kinerja Organisasi Biro PBJ dengan Renstra.

Hasil Evaluasi Sakip Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Inspektorat berdasarkan komponen penilaiannya terlihat pada tabel berikut :

Tabel III-7 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No	Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi internal (25%)	Hasil Evaluasi	
					Nilai	Kategori
1.	24,43	21,68	11,07	13,67	70,85	BB

Sumber Data : LHE Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025

Jika dilakukan perbandingan antara target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan realisasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III-8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Target Renstra	% Capaian Renstra
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70)	BB (70,85)	101,21	BB (70)	101,21

Sumber Data : LHE Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025

Dasar Perhitungan :

Realisasi : Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro PBJ

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{70,85}{70} \times 100 \% \\
 &= 101,21 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi Akhir Renstra} &= \text{Nilai Akuntabilitas Kinerja} \\
 \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{70,85}{70} \times 100 \% \\
 &= 101,21 \%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas pencapaian target indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro PBJ pada tahun 2025 adalah sebesar 101,21% dari target yang ditetapkan yaitu BB (70) dengan realisasi yang dicapai adalah BB (70,85). Capaian nilai akuntabilitas ini telah melebihi dari target yang ditetapkan dan berada pada kategori **Sangat Baik** dengan predikat **BB**.

Berdasarkan tabel tersebut, capaian indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun berjalan menunjukkan hasil yang baik dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Target kinerja ditetapkan pada kategori BB dengan nilai 70, sedangkan realisasi yang dicapai adalah kategori BB dengan nilai 70,85. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 101,21%, yang berarti realisasi telah melampaui target yang direncanakan.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra yang juga berada pada kategori BB (70), capaian tahun ini menunjukkan persentase yang sama yaitu 101,21%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja akuntabilitas

organisasi tidak hanya mampu memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melampaui sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

3.3.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel III-9 Capaian Hasil Evaluasi Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Kriteria Penilaian

Kriteria Penilaian		Tahun	
		2024	2025
Perencanaan Kinerja (30%)		23.51	24,43
Pengukuran Kinerja (30%)		18.89	21,68
Pelaporan Kinerja (15%)		9.13	11,07
Evaluasi internal (25%)		13.17	13,67
Hasil Evaluasi	Nilai	64.70	70,85
	Kategori	B	BB

Berdasarkan tabel tersebut, hasil evaluasi kinerja mengalami peningkatan dari 64,70 pada Tahun 2024 dengan kategori B menjadi 70,85 pada Tahun 2025 dengan kategori BB, atau meningkat sebesar 6,15 poin. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan pada hampir seluruh komponen penilaian. Aspek Perencanaan Kinerja meningkat dari 23,51 menjadi 24,43, yang didorong oleh perbaikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja seperti Renstra, IKI, IKU, RKT, PK, dan SKP dimana pada Tahun 2025 tidak hanya disusun oleh pejabat struktural, tetapi telah diterapkan kepada seluruh ASN termasuk staf, sehingga keselarasan antara kinerja individu dan organisasi menjadi lebih baik.

Pada aspek Pengukuran Kinerja, nilai meningkat cukup signifikan dari 18,89 menjadi 21,68, yang dipengaruhi oleh pelaksanaan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan dan mekanisme data kinerja tersebut telah dituangkan pada SOP Pengukuran dan Pengumpulan data kinerja dimana pelaksanaannya telah dilakukan secara berkala per triwulan dari level staf sampai pimpinan, sehingga kualitas pengukuran kinerja menjadi lebih tertib dan akuntabel. Selanjutnya pada aspek Pelaporan Kinerja, terjadi peningkatan dari 9,13 menjadi 11,07 karena perubahan mekanisme pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara tahunan menjadi pelaporan secara berkala, telah direvisi, telah disampaikan tepat waktu dan dipublikasikan melalui website Biro pengadaan barang dan jasa, sehingga proses monitoring dan pengendalian

capaian kinerja dapat dilakukan lebih berkala dan responsif. Sementara itu, aspek Evaluasi Internal juga mengalami peningkatan dari 13,17 menjadi 13,67 salah satunya karena pemantauan capaian kinerja internal telah dituangkan dalam laporan monev/notulen rapat secara berkala yang memuat target kinerja, realisasi kinerja, factor pendorong dan penghambat, serta saran perbaikan dan telah dilaporkan secara berjenjang sampai level eselon IV.

Secara keseluruhan, peningkatan pada setiap komponen tersebut menunjukkan adanya perbaikan sistem manajemen kinerja yang lebih komprehensif di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang berdampak pada meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja organisasi dan kenaikan kategori penilaian dari B menjadi BB.

Jika dilakukan perbandingan capaian nilai evaluasi kinerja dengan target tahun lalu dapat ditampilkan pada gambar diagram berikut :

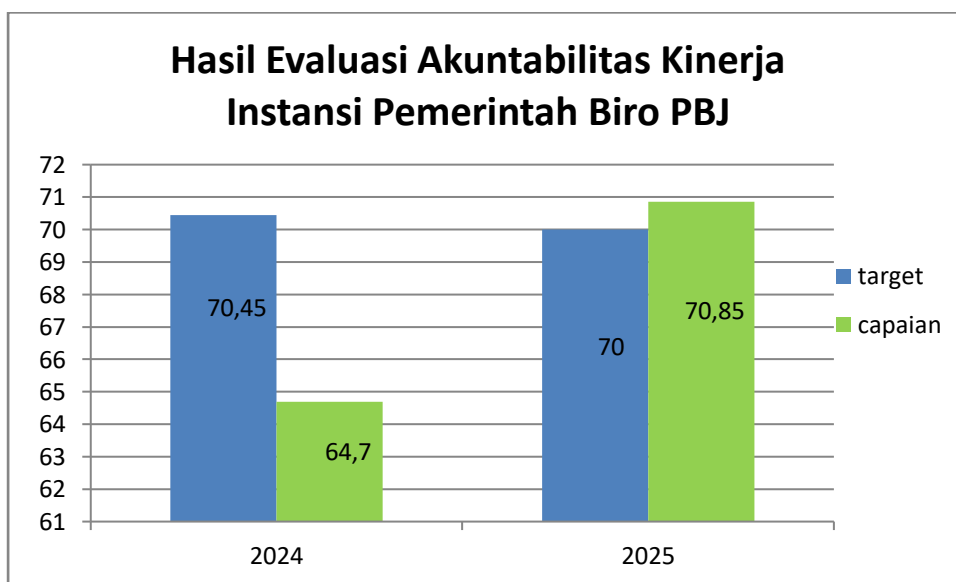


Diagram III-2 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro PBJ

Dari diagram diatas dapat dilihat terjadi peningkatan terhadap pencapaian nilai Evaluasi Kinerja Biro PBJ jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024. Pada tahun ini Biro PBJ dapat mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Terdapat kenaikan 6,15 poin nilai evaluasi kinerja dari capaian nilai pada tahun sebelumnya.

3.3.2.3 Upaya Peningkatan Kinerja

- **Upaya-upaya yang telah dilakukan** oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang di ukur melalui indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja antara lain:
 1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja hingga level individu.
 2. Melakukan penyusunan anggaran kegiatan berdasarkan kinerja (anggaran berbasis kinerja) yang telah ditetapkan pada Renstra tahun 2021-2026.
 3. Menetapkan target pada RKT dan PK selaras dengan target pada Renstra.
 4. Melakukan evaluasi terhadap penyusunan rencana strategis, PK dan pemantauan capaian kinerja secara berkala dan berjenjang.

3.3.2.4 Hambatan Peningkatan Kinerja

- **Kendala dan Faktor Penghambat** dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat, antara lain:
 1. Belum memadainya jumlah SDM yang memiliki pemahaman terkait peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
 2. Pemantauan evaluasi kinerja belum optimal.
 3. Pelaksanaan implementasi dari rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum optimal.
 4. Peranan Pimpinan dalam penyusunan rencana strategis, PK dan pemantauan capaian kinerja belum optimal.
 5. Pemahaman dan kepedulian serta komitmen pegawai yang masih kurang dalam rangka mencapai target kinerja yang direncanakan.

3.3.3 Sasaran Strategis 3

	SASARAN STRATEGIS 3 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ORGANISASI INDIKATOR : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ORGANISASI
---	---

3.3.3.1 Capaian Kinerja

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik Bab I pasal 1 menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut mempertegas bahwa pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik.

Pelayanan publik yang diberikan harus berkualitas. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Kualitas layanan publik menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintah yang baik. Oleh karena itulah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan “meningkatnya kualitas pelayanan publik” sebagai sasaran ketiga untuk mencapai tujuan “Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintah Dengan Aparatur Yang Melayani”.

Pelayanan adalah indikator utama keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utama dari pelayanan adalah kepuasan bagi publik selaku penerima layanan. Oleh karena itu, dibutuhkan survei yang terukur dan terintegrasi secara digital untuk melihat sejauh mana manfaat pelayanan dirasakan oleh masyarakat.

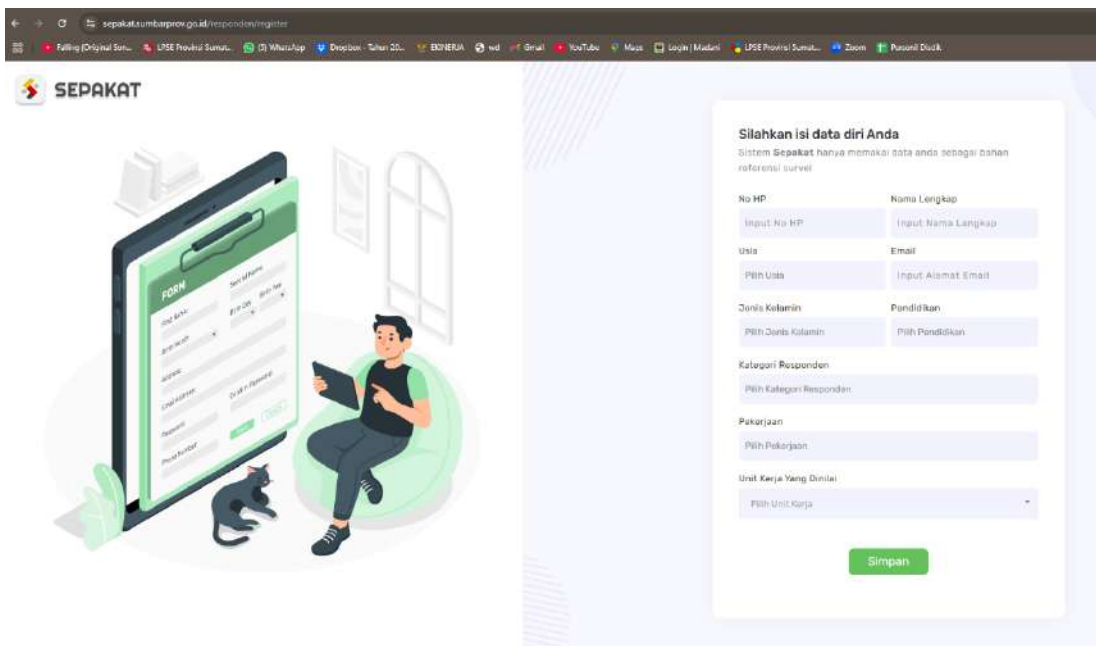
Berdasarkan hal tersebut Provinsi Sumatera Barat melalui Biro Organisasi meluncurkan Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (Sepakat), yang dapat diakses oleh seluruh warga Sumbar melalui situs

sepakat.sumbarprov.go.id. SEPAKAT merupakan aplikasi terintegrasi untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Melalui aplikasi ini, siapa pun dapat menyampaikan penilaian kualitas pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta menyampaikan saran dan kritikan langsung. Hal ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik

Survei Kepuasan Masyarakat bermanfaat untuk memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menilai pelayanan yang ada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Melalui SEPAKAT, masyarakat bisa menyampaikan pendapat dan saran agar layanan menjadi lebih baik. Hasil survei membantu instansi memperbaiki kekurangan, membuat pelayanan lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Teknik pengumpulan data diambil dengan instrumen berupa kuesioner *online* dengan jawaban tertutup yang dapat diakses melalui situs sepakat.sumbarprov.go.id dengan tampilan sebagai berikut :



SEPAKAT

Silahkan isi data diri Anda
Sistem Sepakat hanya memakai data anda sebagai bahan referensi survei

No HP	Nama Lengkap
Ura	Email
Jenis Kelamin	Pendidikan
Kategori Responden	
Pekerjaan	
Unit Kerja Yang Dinilai	

Gambar III-3 Tangkapan Layar Aplikasi Sepakat

Unsur pelayanan yang menjadi penilaian antara lain :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana.

Hasil perhitungan akan direkap dan akan didapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada OPD dengan memperhatikan rentang nilai sebagai berikut :

Tabel III-10 Nilai Interval Konversi

No.	MUTU PELAYANAN	RENTANG NILAI	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
1	A	88,31 – 100,00	Sangat baik
2	B	76,61 – 88,30	Baik
3	C	65,00 – 76,60	Kurang Baik
4	D	25,00 – 64,99	Tidak Baik

Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Organisasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III-11 Hasil survey Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2025

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
OPD BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

NILAI IKM	Nama Layanan	
	Jumlah	: 219 Orang
	Jenis Kelamin	: L = 88 orang / P = 131 orang
	Pendidikan	: SD = 4 orang
		SMP = 10 orang
		SMA = 77 orang
		DIII = 23 orang
		S1 = 84 orang
		S2 = 13 orang
		S3 = 2 orang
	Periode	: 01-01-2025 s/d 31-12-2025

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Keterangan :		No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1 - U9	Unsur - Unsur pelayanan	U1	Persyaratan	3.23
NRR	Nilai rata-rata	U2	Prosedur	3.31
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat	U3	Waktu Pelayanan	3.3
NRR Per Unsur	Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi	U4	Biaya/Tarif	3.45
NRR tertimbang	NRR per unsur x 0,111 per unsur	U5	Produk Layanan	3.29
IKM UNIT PELAYANAN		U6	Kompetensi pelaksana	3.43
Mutu Pelayanan :		U7	Perilaku pelaksana	3.39
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00	U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.25
B (Baik)	: 76,61 - 88,30	U9	Sarana dan Prasarana	3.58
C (Kurang Baik)	: 65 - 76,60			
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99			

3.3.3.2 Perbandingan Capaian Terhadap Target Renstra

Perbandingan antara target nilai Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dengan realisasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III-12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2025

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Target Renstra	% Capaian Renstra
	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	B (80)	83	103,75	B (80)	103,75

Dasar Perhitungan :

Realisasi : Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{83}{80} \times 100 \% \\
 &= 103,75 \%
 \end{aligned}$$

Realisasi Akhir Renstra : Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{83}{80} \times 100 \% \\
 &= 103,75 \%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 103,75%. Pencapaian Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi ini telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu target nilai 80. Dan capaian kinerja ini dikategorikan ke dalam capaian mutu pelayanan kategori **B (Baik)**.

Berdasarkan tabel tersebut, capaian indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun berjalan menunjukkan hasil yang baik dan telah melampaui target yang ditetapkan. Target kinerja berada pada kategori B dengan nilai 80, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 83 sehingga persentase capaian kinerja mencapai 103,75%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan organisasi telah berada di atas standar yang direncanakan.

Jika dibandingkan dengan target Renstra yang juga ditetapkan pada kategori B (80), realisasi tahun ini menunjukkan capaian yang sama yaitu sebesar 103,75%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pelayanan organisasi tidak hanya mampu memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melampaui sasaran jangka menengah yang telah direncanakan dalam dokumen strategis.

3.3.3.3 Capaian Kinerja Di Bandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan hasil capaian tahun lalu dapat dilihat pada grafik berikut :

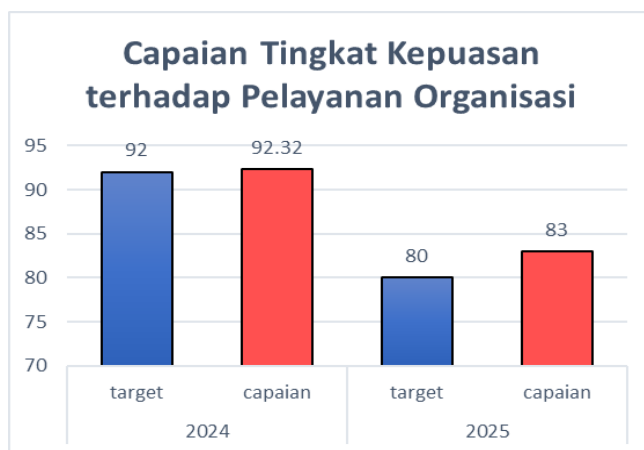


Diagram III-3 Capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

Capaian Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi Biro PBJ tahun 2025 dengan nilai 103,75%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 dengan nilai 92,32% capaian Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi Biro PBJ meningkat sebesar 11,43 %.

Capaian Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 mencapai 103,75%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 92,32%, terjadi peningkatan sebesar 11,43%. Peningkatan tersebut tidak hanya mencerminkan adanya perbaikan kualitas pelayanan, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan metode pengukuran yang digunakan pada kedua tahun tersebut.

**Tabel III-13 Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Pada
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024**

No	Variabel Penilaian	Penilaian
1	Kemudahan Prosedur	93,18
2	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	93,40
3	Penjelasan yang diberikan oleh petugas	92,95
4	Profesionalisme petugas pelayanan	92,72
5	Kecepatan pelayanan	92,95
6	Kesopanan dan keramahan petugas	91,59
7	Kenyamanan lingkungan	89,31
8	Fasilitas/ Sarana & prasarana	90,45
9	Efektifitas Layanan Petugas	94,31
10	Efektifitas Fasilitas Layanan	92,27
Total Nilai Pembobotan		92,32

Pada tahun 2024, survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Biro PBJ melalui penyebaran kuesioner berbasis Google Form kepada masyarakat/pengguna layanan yang berkunjung ke LPSE. Instrumen penilaian disusun internal dengan variabel seperti kemudahan prosedur, kesesuaian persyaratan, profesionalisme petugas, kecepatan pelayanan, hingga fasilitas sarana dan prasarana, dengan hasil sebagaimana pada tabel lampiran pertama (nilai rata-rata 92,32). Metode ini bersifat spesifik unit kerja sehingga ruang lingkup responden dan standar penilaian masih terbatas pada persepsi pengguna layanan langsung Biro PBJ.

Sementara itu, pada tahun 2025 pengukuran tingkat kepuasan dilakukan melalui aplikasi SEPAKAT yang digunakan secara terintegrasi oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Instrumen penilaian pada aplikasi tersebut telah distandarkan, meliputi unsur pelayanan sesuai ketentuan nasional seperti persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana. Dengan sistem yang terintegrasi, jumlah responden lebih representatif (219 responden) serta proses pengolahan data lebih objektif dan terukur, menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83 (kategori Baik) yang kemudian dikonversi menjadi capaian kinerja 103,75%.

Dengan demikian, kenaikan capaian tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu (1) adanya peningkatan

kualitas pelayanan yang tercermin dari persepsi masyarakat, dan (2) penggunaan metode survei yang lebih terstandar, terintegrasi, dan memiliki cakupan responden yang lebih luas melalui aplikasi SEPAKAT. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola pelayanan yang dilakukan Biro PBJ telah memberikan dampak positif terhadap kepuasan pengguna layanan.

3.3.3.4 Upaya Peningkatan Kinerja

- **Upaya yang dilakukan untuk mencapai target** pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi yang diukur melalui indikator kinerja pada Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi antara lain :
 1. Memberikan pelayanan prima.
 2. Memastikan seluruh layanan sudah sesuai dengan SOP.
 3. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana.
 4. Penambahan petugas pelayanan.
 5. Peningkatan kompetensi dan integritas SDM (petugas pelayanan).
 6. Melakukan inovasi seperti memberikan pelayanan tambahan di luar hari kerja (pelayanan pada *Car Free Day*).

3.3.3.5 Hambatan Peningkatan Kinerja

- **Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target** untuk meningkatkan Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, antara lain:
 1. Kurangnya minat masyarakat untuk mengisi survey kepuasan.
 2. Perubahan regulasi yang dinamis menuntut adaptasi berkelanjutan.
 3. Belum optimalnya sosialisasi terhadap pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat.
 4. Perbedaan tingkat pemahaman perangkat daerah terkait regulasi dan proses pengadaan.

3.4 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja ditentukan oleh kebutuhan anggaran sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan tahun 2025. Dari 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025 melalui APBD telah dialokasi anggaran

sebesar Rp Rp. 1.329.038.566,00 dan pada akhir tahun 2025 Biro PBJ telah melakukan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.291.526.280,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III-14 Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	993,613,566	993,613,566	984,255,780	99.06
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,020,000	1,020,000	1,008,000	98.82
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,020,000	1,020,000	1,008,000	98.82
1.2	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	16,500,000	16,500,000	16,480,000	99.88
1.2.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16,500,000	16,500,000	16,480,000	99.88
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000	10,000,000	8,670,000	86.7
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,000,000	10,000,000	8,670,000	86.7
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	647,704,532	647,704,532	646,391,331	99.8
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,115,000	5,115,000	4,884,000	95.48
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53,642,300	53,642,300	52,643,284	98.14
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,588,000	7,588,000	7,587,915	100
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	581,359,232	581,359,232	581,276,132	99.99
1.5	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31,410,900	31,410,900	25,863,999	82.34
1.5.1	Pengadaan Mebel	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,410,900	30,410,900	24,863,999	81.76
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200,008,134	200,008,134	200,008,134	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	370,000	370,000	370,000	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199,638,134	199,638,134	199,638,134	100
1.7	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,970,000	86,970,000	85,834,316	98.69
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62,340,000	62,340,000	61,499,316	98.65
1.7.2	Pemeliharaan Mebel	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,630,000	23,630,000	23,335,000	98.75
2	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	335,425,000	335,425,000	307,270,500	91.71
2.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	54,785,000	54,785,000	54,752,000	99.94

2.1.1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	48,685,000	48,685,000	48,663,000	99.95
2.1.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	3,660,000	3,660,000	3,649,000	99.7
2.1.3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2,440,000	2,440,000	2,440,000	100
2.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	216,660,000	216,660,000	201,575,000	91.71
2.2.1	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	214,220,000	214,220,000	199,139,000	92.96
2.2.2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1,220,000	1,220,000	1,220,000	100
2.2.3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1,220,000	1,220,000	1,216,000	99.67
2.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	63,980,000	63,980,000	50,943,500	80.17
2.3.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	10,210,000	10,210,000	6,890,000	67.48
2.3.2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	44,150,000	44,150,000	35,427,000	80.24
2.3.3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jas	9,620,000	9,620,000	8,626,500	89.67
Total Anggaran		1,329,038,566	1,329,038,566	1,291,526,280	97.18

Secara umum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak menghadapi kendala yang signifikan dalam pelaksanaan dan realisasi 24 subkegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA Tahun Anggaran 2025. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp37.512.286,00 yang berasal dari beberapa komponen belanja, yaitu Belanja Modal, belanja honorarium narasumber, belanja makan dan minum rapat, serta belanja pelatihan dan pemeliharaan mainframe.

Sisa anggaran pada Belanja Modal serta belanja makan dan minum rapat merupakan hasil efisiensi pelaksanaan kegiatan. Adapun sisa anggaran pada belanja honorarium narasumber disebabkan oleh penggunaan narasumber yang berasal dari internal OPD, sehingga pembayaran honorarium hanya dapat direalisasikan sebesar 50% sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, belanja pemeliharaan mainframe tidak direalisasikan karena selama tahun anggaran berjalan tidak terdapat kerusakan pada perangkat mainframe yang memerlukan pemeliharaan

3.5 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi tidak dijelaskan per sasaran kinerja dikarenakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Provinsi Sumatera Barat, seluruh Program/Kegiatan/Sub Kegiatan secara bersamaan mendukung sasaran Meningkatnya tata kelola Pengadaan barang dan Jasa Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi , dan meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan efisiensi anggaran secara optimal dalam peningkatan sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas kinerja. Efisiensi dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi pengadaan barang dan jasa secara daring, sehingga mampu menekan biaya perjalanan dinas, akomodasi, dan sewa tempat.

Selain itu, pengendalian belanja operasional juga dilakukan dengan pengurangan anggaran makan dan minum rapat. Dalam pelaksanaan rapat internal, kegiatan sering dilaksanakan tanpa penyediaan makan dan minum rapat serta lebih mengutamakan metode virtual atau pertemuan sederhana sesuai ketentuan. Langkah ini menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang hemat, efektif, dan tetap berorientasi pada peningkatan profesionalisme SDM.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, yakni:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana mana ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 telah dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan LKj tahun ketiga dari Renstra SKPD Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. Pada Penetapan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja.
4. Dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam PK Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis tersebut menunjukkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **113,15%** dengan katagori **Sangat Baik**.
5. Secara umum pencapaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah baik. Hal ini disebabkan oleh karena :
 - a. Adanya komitmen dan dukungan yang kuat dari Gubernur, Sekretaris Daerah dan beserta seluruh pejabat fungsional/staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat.

- b. Meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan jasa
 - c. Meningkatkan pelayanan organisasi terhadap masyarakat/*stakeholder*.
6. Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2025, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya tindak lanjut serta langkah-langkah yang diambil sebagai berikut :
- a. Mengeluarkan Surat Edaran Gubernur kepada seluruh OPD Nomor 1014 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan pada tahun anggaran 2026
 - c. Dilakukan pengaturan sistem kerja berupa SOP dan pembagian tugas, serta dilakukan sosialisasi kepada petugas pelayanan
 - d. Mendorong seluruh PPK OPD untuk mengikuti Diklat Kompetensi PPK ataupun Diklat PBJ Lainnya.
 - e. Memprioritaskan metode pemilihan menggunakan *e-purchasing* pada pengadaan barang dan jasa.
 - f. Melakukan Pelatihan Kantor Sendiri dan kegiatan bimbingan teknis BARAJA PBJ dalam rangka peningkatan sumber daya pengelola pengadaan barang dan jasa.
 - g. Melakukan penugasan PIC (Person In Charge) atau Penanggung Jawab untuk masing-masing OPD terkait permasalahan lingkup pengadaan barang dan jasa sehingga lebih memudahkan koordinasi serta percepatan penanganan permasalahan.

4.2 Saran

1. Dalam rangka meningkatkan Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik Provinsi Sumatera Barat maka kedepannya Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan menargetkan Peningkatan Skor ITKP dengan cara memaksimalkan pemanfaatan *E-Purchasing* di seluruh Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat.

2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Biro Pengadaan Barang dan Jasa berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah baik. Biro Pengadaan Barang dan Jasa akan meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan dengan cara berkoordinasi dengan Biro Umum.

3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Rencana Aksi seluruh pegawai secara berjenjang setiap Bulan atau Triwulan. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi setiap Triwulan terhadap Perjanjian Kinerja (PK) sehingga capaian kinerja bisa tercapai sesuai target serta menyimpan dan mendokumentasikan semua dokumen evaluasi dan pelaporan terkait Akuntabilitas Kinerja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2026

**KEPALA BIRO
PENGADAAN BARANG DAN JASA**



**CERRY M. ST. MM
NIP. 19761016 200812 1 001**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Nama Perangkat Daerah : Biro Pengadaan Barang dan Jasa
- Tugas Pokok : Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Fungsi :
- Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Penyiapan pengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA PENGHITUNGAN	Baseline	Sumber Data
1	Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik = Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ (bobot 30%) + Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ (bobot 40%) + Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan (bobot 30%).	70	Biro PBJ

Padang, Januari 2025

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



CERRY, M. ST, MM

NIP. 19761016 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA
&
RKT



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Padang - Sumatera Barat 25112
Telp. / Fax. (0751) 33985 email: biropbj@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CERRY M, ST., MM**

Jabatan : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YOZARWARDI U.P, S.Hut., M.Si.**

Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Padang, Januari 2025

PIHAK KEDUA

YOZARWARDI U.P, S.Hut., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

PIHAK PERTAMA

CERRY M, ST., MM

Pembina
NIP. 19761016 200812 1 001

28 FEB 2025

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata kelola Pengadaan Minimal Baik	(95)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,45)
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	A (92)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 1.613.865.000,-	APBD
2.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 386.135.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 2.000.000.000,-	APBD

Padang, Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 



YOZARWARDI U.P, S.Hut., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

**Plt. KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA,**



CERRY M, ST., MM

Pembina
NIP. 19761016 200812 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Padang - Sumatera Barat 25112
Telp. / Fax. (0751) 33985 email: biropbj@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CERRY M, ST., MM**

Jabatan : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARRY YUSWANDI, S.KM., M.KM**

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Padang, Juni 2025

PIHAK KEDUA



ARRY YUSWANDI, S.KM., M.KM
Pembina Utama Muda
NIP. 19750810 199903 1 006

PIHAK PERTAMA

CERRY M, ST., MM
Pembina
NIP. 19761016 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata kelola Pengadaan Minimal Baik	(70)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70)
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	A (80)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 936.888.566,-	APBD
2.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 292.150.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 1.229.038.566,-	APBD

Padang, Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH,



ARRY YUSWANDI, S.KM., M.KM

Pembina Utama Muda
NIP. 19750810 199903 1 006

**KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA,**

CERRY M, ST., MM

Pembina
NIP. 19761016 200812 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Padang - Sumatera Barat 25112
Telp. / Fax. (0751) 33985 email: biropbj@sumbarprov.go.id

RENCANA KERJA TAHUNAN

Nama OPD : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov.Sumbar
Tahun : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata kelola Pengadaan Minimal Baik	70
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	70
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80

Padang, Januari 2025
Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

CERRY M, ST, MM
NIP. 19761016 200812 1 001

CROSSCUTTING

CASCADING BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Prov. Sumbar
IK : 1. Rata-rata IKM pada unit Pelayanan Publik
2. Rata-rata indeks kepuasan terhadap Layanan Sekretariat Daerah

Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa
IK: Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ
IK : Tingkat kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ

LKPP
IK : Indeks Tata Kelola
Pengadaan

BPSDM
IK : Persentase ASN yang
kompeten, Indeks
Profesionalitas ASN, serta
efektivitas dan kualitas

Meningkatnya pemanfaatan Sistem Pengadaan serta data dan informasi dalam pelaksanaan PBJ
IK : Tingkat Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Seluruh OPD

Meningkatnya KematanganUKPBJ
IK : Tingkat Kematangan UKPBJ

LKPP
IK : Indeks Tata Kelola
Pengadaan

Optimalisasi
perencanaan kebutuhan
SDM PBJ
IK: 1. Jumlah dokumen
kebutuhan SDM PBJ

Optimalisasi
pengembangan SDM
PBJ
IK: 1. Jumlah dokumen
rencana pelatihan dan
pengembangan
kompetensi SDM PBJ
2. Jumlah SDM yang
mengikuti pelatihan
dan pengembangan
komptensi

Transparansi
rencana umum
pengadaan barang
dan jasa
IK: % RUP terhadap
nilai belanja PBJ
yang diumumkan

Meningkatnya
pemanfaatan e-
katalog pada OPD
IK: % OPD yang
memanfaatkan e-
katalog

Meningkatnya
pemanfaatan non
etendering/non
epurchasing pada
OPD
IK: % OPD yang
memanfaatkan non
etendering/non
epurchasing

Meningkatnya
pemanfaatan e
tendering pada OPD
IK: % OPD yang
memanfaatkan e
tendering pada OPD

Meningkatnya
pemanfaatan e
kontrak pada OPD
IK: % OPD yang
memanfaatkan e
kontrak pada OPD

Pemanfaatan
aplikasi
pendukung PBJ
IK : Laporan data
dan informasi PBJ
terintegrasi

Terpenuhinya JF
PPBJ
IK : % JF PPBJ
dibandingkan
formasi JF PPBJ

kematangan
kelembagaan
UKPBJ
IK. Tingkat
kematangan
kelembagaan
UKPBJ

Terintegrasinya
proses PBJ mulai
dari perencanaan,
pemilihan dan
pelaksanaan
kontrak
IK :
1. Jumlah SOP
pengadaan
terintegrasi
2. % PBJ sesuai SOP
pengadaan
terintegrasi

Terlaksananya
pembinaan dan
advokasi PBJ
IK :
1. Jumlah bimtek PBJ
yang dilaksanakan
2. % OPD yang
dilakukan
pendampingan PBJ
3. % permasalahan PBJ
yang di berikan layanan
konsultasi

Terlaksananya
Pemantauan dan Evaluasi
RUP
IK: Jumlah OPD yang
dipantau dan dievaluasi

Terlaksananya
Pemantauan dan
Evaluasi e-katalog
IK: Jumlah OPD yang
dipantau dan
dievaluasi

Terlaksananya
Pemantauan dan
Evaluasi non
etendering/non
epurchasing
IK: Jumlah OPD yang
dipantau dan
dievaluasi

Terlaksananya
Pemantauan dan
Evaluasi e tendering
IK: Jumlah OPD yang
dipantau dan dievaluasi

Terlaksananya
Pemantauan dan
Evaluasi e kontrak
IK: Jumlah OPD yang
dipantau dan
dievaluasi

MATRIKS LHE

MATRIK TINDAK LANJUT REKOMENDASI SAKIP TAHUN 2024
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PERENCANAAN KINERJA

NO	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1	Penetapan target pada RKT dan PK pada tahun berikutnya secara berkualitas, menantang, realistis, serta selaras dengan target pada Renstra. Jika terdapat perbedaan target dengan Renstra, agar diinformasikan dalam laporan kinerja.	Menyusun RKT dan Menyusun PK Struktural	1 Dokumen 5 Dokumen	Jan s/d Maret 2025	Kabag dan Kasubag	Januari 2025
2	Agar Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai dengan baik, jika terdapat potensi target tidak tercapai dapat melakukan perubahan target melalui perubahan perjanjian kinerja.	Menyusun PK Perubahan	1 Kali	Juni 2025	Kabag dan Kasubag	Juni 2025
3	meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh pegawai dalam mencapai kinerja yang direncanakan.	Monev Seluruh Staf	53 orang	Jan s/d Des 2025	Kabag dan Kasubag	Des 2025

Padang, Januari 2026
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa



CERRY.M. ST, MM
NIP. 19761016 200812 1 001

MATRIK TINDAK LANJUT REKOMENDASI SAKIP TAHUN 2024
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PENGUKURAN KINERJA

NO	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1	Meningkatkan capaian kinerja lebih baik pada tahun berikutnya untuk seluruh indikator kinerja	Rapat Monev Seluruh Staf	12 Kali	Jan s.d Des 2025	Kabag dan Kasubag	Jan s.d Des 2025
2	agar pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan	Reviu dan evaluasi terhadap Kinerja	4 Kali	Maret, Juni, September, Desember 2025	Pejabat Struktural	Maret, Juni, September, Desember 2025
3	melakukan upaya nyata agar seluruh pegawai terlibat dalam penyusunan dokumen pengukuran kinerja serta meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai atas hasil pengukuran kinerja	Rapat penyusunan dokumen dan evaluasi hasil pengukuran kinerja	2 Kali	TW I dan TW IV 2025	Pejabat Struktural	TW I dan TW IV 2025

Padang, Januari 2026
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa



CERRY.M. ST. MM
NIP. 19761016 200812 1 001

MATRIK TINDAK LANJUT REKOMENDASI SAKIP TAHUN 2024
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PELAPORAN KINERJA

NO	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1	agar dokumen laporan kinerja sepenuhnya mengungkapkan seluruh informasi yang memadai tentang kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, jangka menengah, dengan tahun - tahun sebelumnya, secara nasional, keberhasilan dan kegagalan, upaya nyata dan hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, sdm, mekanisme, sarana prasarana) dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.	Perbaikan Laporan Kinerja	1 Laporan	Maret 2025	Kabag	Maret 2025
2	memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sehingga memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	Sosialisasi informasi dalam laporan kinerja	1 Kali	Mei 2025	Kabag	Mei 2025
3	melakukan upaya nyata agar seluruh pegawai peduli terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja sehingga informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi budaya kinerja organisasi	Sosialisasi informasi dalam laporan kinerja	1 Kali	Mei 2025	Kabag	Mei 2025

Padang, Januari 2026
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa



CERRY.M. ST, MM
NIP. 19761016 200812 1 001

MATRIK TINDAK LANJUT REKOMENDASI SAKIP TAHUN 2024
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

NO	Rekomendasi LHE atas Laporan 20224	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1	agar pemantauan capaian kinerja internal dilaksanakan oleh SDM (sumber Daya Manusia) dengan pendalaman yang memadai sesuai dengan SOP (Standar, Operasional dan Prosedur) secara berjenjang sampai level staf	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja	4 Kali	Setiap Triwulan 2025	Kabiro, Kabag dan Kasubag	Setiap Triwulan 2025
2	meningkatkan implementasi SAKIP serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi E-Sakip dengan entry an tepat waktu	1 Dokumen	Feb s/d Des 2025	Kabag dan Kasubag	Feb s/d Des 2025
3	memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja, sehingga terjadi peningkatan dan perbaikan kinerja.	Penetapan target pada dokumen perencanaan telah menpedomani hasil E-Sakip	1 Dokumen	Mei 2025	Kabag dan Kasubag	Feb s/d Des 2025

Padang, Januari 2026
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa


CERRY, M. ST, MM
 NIP. 19761016 200812 1 001

SURVEY IKM 2024 & 2025

**PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PER
RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROVINSI SUMATERA BARAT
Tahun 2025**

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	1376012006080001	Sri Razaq Hidayatullah	3	3	3	2	3	3	3	2	2
2	1305046710800002	Yenita sovia	3	3	3	3	3	3	3	3	4
3	1310044709040002	Adik Puji Astuti	3	3	4	3	3	4	4	4	4
4	1373015605680001	Susmairi Zoebir, SPd	2	3	3	4	3	3	3	2	4
5	1371114503910012	Margaret Dwi Forta	4	4	3	4	4	4	4	4	4
6	1375021202710001	Ondri	3	3	3	3	3	4	4	4	4
7	1312096008970004	Gustia Mahendra	2	1	1	4	1	1	1	1	1
8	1375036606820001	Rahayu Fitri yanti	3	4	4	3	4	4	4	4	3
9	1371111010690016	Pangolasan Matondang	3	3	3	3	3	3	3	3	4
10	1306111905030001	Syukra al hamda	4	4	4	3	3	4	4	4	4
11	1305017112700002	Herlina	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	0895401671794	aasgasgasg	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	197607102006041006	Dedi irawan	4	3	3	4	4	3	3	3	4
14	081266296216	ANHAR	4	3	4	3	4	3	4	3	3
15	085263231250	Sukardi	3	3	2	4	3	2	3	2	3

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
16	085376795673	ayesha nurdin	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	08526362790	Nelisuarni	3	3	3	4	3	3	3	3	3
18	085246513695	Nina lestari	3	3	2	4	3	3	3	3	3
19	0895405397075	Safiinatul muthmainnah	3	2	3	3	3	4	4	3	4
20	082385315430	Surya Trimonanda	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	082261539641	Melsa Antika Sari	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	081374231604	Fitrya Putry	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	0895337254904	Ghina Riza Amrilia	3	4	4	3	4	3	4	4	4
24	082390152448	Bunga Nurfajri Desra	3	4	3	3	4	4	4	4	4
25	083863981107	Muhanni	3	3	1	4	3	3	3	3	4
26	083105064226	Renisya Meilany	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	081378823016	Muhammad Fadhil	3	3	3	4	3	4	3	3	4
28	083899256627	Muhammmad syauki Nur khalik	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	085272226857	RIZKY RAHMAT FADILL	4	4	3	4	3	3	3	3	4
30	083837541982	Muhammad Sabri	3	3	3	3	1	2	3	2	3
31	083183970895	Pryyoga Subianto	3	3	4	4	2	4	3	4	4
32	085143413026	Almutapri	3	3	3	3	1	4	3	3	4
33	082285238810	Yusnimar	4	3	4	4	4	4	3	4	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
34	085222820446	Penti nur Afiani	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	081370496862	Aidil Agustin	3	3	2	4	4	3	2	3	3
36	085363712919	QAF furqan	3	3	3	3	3	4	4	4	4
37	081268128913	YOGA YAHYA ANDIKA	3	3	3	4	3	2	2	3	4
38	085833985479	muhammad alfarizi	3	4	3	4	4	4	4	4	4
39	083189720074	NANANG KURNIAWAN	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	081363323077	Islami	3	2	3	4	4	4	4	3	4
41	082283019817	Ariyandi	2	3	4	4	4	4	4	4	4
42	082170608871	Ali arni	3	3	3	4	3	3	3	2	4
43	081374008524	Afriwal Tanjung	3	3	3	3	3	3	3	3	4
44	085274038681	Nyon Elvis	3	3	3	4	3	3	3	3	3
45	083863980560	Tomi Syah anggara	3	4	3	4	4	4	4	4	4
46	082170841331	marditos	3	3	3	4	2	4	4	3	3
47	081295322178	Alimah	3	3	4	4	4	4	4	4	4
48	081381439115	Harna yulini	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	0895386875019	Dehan Fahresta	2	3	3	4	4	4	3	3	4
50	081270541219	Nur Hasnah Putri	4	4	4	4	4	4	4	3	4
51	082173003837	Darmaita	1	3	1	2	2	4	3	2	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
52	083192043162	Puspita Sri Dewi Syafridar	3	3	4	3	3	4	3	4	4
53	081384895415	Teti riswarni	1	1	3	4	3	3	3	2	4
54	082172769568	Indah Novia Hendra	3	3	3	3	3	3	3	3	4
55	085363254656	Afifah Rahmah Azzahra	3	3	3	3	3	3	3	3	4
56	082174432704	Rafdimar	3	3	4	4	4	4	3	2	4
57	083180803572	Mega marini	3	4	4	3	3	4	3	3	4
58	08116619911	Erna Tri Kusuma	4	4	4	3	4	4	4	4	4
59	081280402407	Ratnawati	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	081365286386	Novepasma Sahim	3	3	3	4	3	3	3	2	4
61	082113855581	Gustiawan Pariz	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	082279020919	Yendri dinata	4	3	3	3	3	3	4	3	3
63	085263466125	HISRIZAL	3	4	2	4	3	4	4	3	3
64	08116611563	Fahrodi	3	3	3	3	3	3	3	3	3
65	081371166538	DEVI APRIA WIJAYA	3	3	3	4	3	3	3	3	3
66	081374340880	Hendri	2	2	2	2	1	3	3	3	2
67	082285251421	Marihot Simanullang	3	3	3	3	3	4	3	3	4
68	085263058388	A.Arianto	3	3	3	4	2	3	3	3	4
69	081266217703	YUDI GUSPERI	4	4	4	3	3	4	4	4	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
70	085261214849	Lelo Ritonga	4	4	4	3	3	4	4	4	4
71	085376553750	Edi Emra	4	3	3	2	3	3	3	3	4
72	082386115864	armondrik	4	4	4	3	4	4	4	4	4
73	085376182275	M nur	4	4	3	4	4	4	4	3	4
74	083861936547	Siti Nuraini	3	3	4	4	4	4	4	4	4
75	083845140585	Dea Rezki Alda	3	3	3	3	3	3	3	3	3
76	085321889503	Aminatul Zahra	3	3	3	3	3	3	3	3	3
77	082389270609	Maulana Ardhi Warman Putra A.md.Kep	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78	081261891231	Alza Syofyan Andri B, S.Pd, M.M	4	4	3	4	3	4	4	4	4
79	082386670901	Adinda Putri	2	3	2	2	2	3	2	2	2
80	082285020941	Dr.Akmal,M.Pd	3	4	3	2	3	3	3	3	4
81	082298678255	Dra.Murniati.M.Pd	4	4	2	4	4	4	4	3	3
82	081212953593	Musniar MD	3	3	3	3	4	4	3	2	4
83	081310768108	Yunismar	4	4	4	3	3	3	4	4	4
84	081316469880	Windriati	4	4	4	3	4	4	4	4	4
85	082311631443	Rudi Ricardo	3	3	3	2	3	3	3	3	3
86	081222345013	Sri agustin	3	3	3	4	3	3	4	3	4
87	082124722799	Corylasfitri	2	4	4	4	4	4	4	4	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
106	081363316886	Yuli Erman	3	3	3	2	3	3	3	3	3
107	082171811588	Difa Aulia Ramahdani Agus	2	3	3	3	4	3	4	4	3
108	081267308053	Helmi	1	4	4	3	3	4	4	4	4
109	081371508181	Riza Wahyuli	3	3	4	2	3	3	3	3	3
110	083181486687	Rina suryani	4	4	4	2	4	4	4	4	4
111	081166988416	Fefi amelia	4	4	4	4	4	3	3	3	3
112	082383621700	Diah Kurniasari Dwi Yulianti	3	3	3	3	3	3	3	3	3
113	085271672165	Purmata sari	3	3	4	3	3	3	4	4	3
114	1305714707820009	Elia novita	3	3	3	4	3	3	3	3	3
115	081374130842	MHD REZA	3	3	3	4	4	4	3	3	3
116	081286503427	Iffah Annadiyah	4	3	4	3	3	4	4	4	4
117	082181746902	Rina Adriani	3	2	2	2	2	2	3	2	2
118	081374640491	Lola	2	3	3	4	2	3	3	2	2
119	081267879797	Sri Wahyuni	4	3	4	4	4	4	4	4	4
120	083867915522	Sri Endang	2	3	3	4	3	4	3	3	4
121	081218388011	Bonik juninato	3	3	4	4	3	3	3	3	4
122	082382011343	Novita Rahmawati	3	3	3	3	3	3	3	3	4
123	082174458681	Ulfadli dasa novi	3	4	4	4	4	4	4	4	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
124	083130858547	Dewi susanti	4	3	3	4	3	4	4	3	4
125	082284651114	zuherni	4	4	4	4	4	4	4	4	4
126	089518926698	RYAN SIDIQ	3	3	3	4	3	3	3	4	3
127	083161015291	VELMANESHA	4	4	4	3	3	3	3	3	4
128	082386879631	ZALNOFRI	4	3	4	4	4	4	4	4	4
129	085274283336	firman putra	2	2	4	3	3	3	3	3	3
130	083184691651	Fino	3	3	2	3	3	3	3	2	3
131	085364291040	JHON HENDRI, S HI	3	3	3	3	3	3	2	3	3
132	08116668926	Laberqi pamitama	3	3	3	4	3	3	3	2	2
133	082173763559	Endra	3	4	3	4	4	4	4	3	4
134	081275220965	A.H.ARSLANDA.H.ARSLAND6	4	4	3	4	4	3	3	3	4
135	085363772892	Ambo	3	3	3	4	3	3	3	3	4
136	082384548909	Afrizal Amir wk. Dt. Rangkayo Majolelo	2	2	3	3	3	3	3	2	3
137	082115203528	Azhari	4	4	4	4	4	4	4	4	4
138	083182302211	Jihan Salsabila	3	3	3	3	3	3	3	2	3
139	085263962666	TRI OKTARINA	3	3	4	4	3	4	3	3	4
140	083114782945	Dina Sapitri	4	3	3	3	4	3	3	3	3
141	081271530911	KEYZA NEVIA AGUSTINA	4	4	3	3	3	4	3	4	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
142	089527989395	BUNGA JUZEN LESTARI	4	4	4	4	4	4	4	4	4
143	082171540569	Ana khairunnisa	3	3	3	3	3	4	4	4	3
144	085272726769	Faisal Faruqqi	4	3	3	4	4	4	3	3	3
145	082281593775	Lisa Yunika	3	3	3	4	3	4	4	3	4
146	082171783913	Hadiva Gustia H	3	4	4	3	4	3	4	4	4
147	083181355019	Rahma Putri Maiyuri	4	4	4	4	4	4	4	4	4
148	083190849022	Anisa Putri	3	3	3	3	3	3	3	3	3
149	083838104454	Mulya Hidayat	3	3	3	3	3	3	3	3	3
150	082286151402	Dinda Deva putri	4	3	3	3	4	3	4	3	4
151	083137687811	Arma salida	4	4	4	4	3	4	4	4	4
152	085762348507	Rosmaningsih	3	3	3	4	3	3	3	3	4
153	081372085178	Falsanar Piliang	3	3	3	4	3	3	3	3	4
154	082389244545	Leisa mesra dona	4	4	4	4	4	4	4	4	4
155	085263882755	Efrianto	4	3	4	4	4	4	4	4	4
156	082171839815	Natasyha Ananda Putri Ardi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
157	085364567738	Danil Yohanda	2	4	4	2	4	4	2	2	2
158	081374887441	melba	3	4	4	4	4	3	4	4	4
159	081371537093	Alda siswenda putri	4	4	4	4	3	3	3	4	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
214	081361681001	Surya Jhoni Satriawan	3	3	2	3	2	2	2	2	2
215	089765436719	Rsk	4	4	3	4	3	4	4	3	1
216	085761943624	Nelfitri	3	3	3	3	2	3	2	3	3
217	083193003171	Putri afriana	3	3	3	3	3	3	3	3	4
218	082258071408	Suci Mardatillah	4	4	2	4	3	4	4	4	4
219	083189329381	Zahrah Arza Wijaya	3	3	4	3	4	4	4	4	4
Total			708	724	722	755	720	751	743	711	784
NRR			3.23	3.31	3.3	3.45	3.29	3.43	3.39	3.25	3.58
NRR Tertimbang			0.36	0.36	0.36	0.38	0.36	0.38	0.37	0.36	0.39
IKM			3.32								
Konversi IKM			83								
Nilai Layanan			B: Baik								

Keterangan :	
U1 - U9	Unsur - Unsur pelayanan
NRR	Nilai rata-rata
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat
NRR Per Unsur	Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang	NRR per unsur x 0.111 per unsur

IKM UNIT PELAYANAN			
Mutu Pelayanan :			
A	(Sangat Baik)	:	88,31 - 100,00
B	(Baik)	:	76,61 - 88,30
C	(Kurang Baik)	:	65 - 76,60
D	(Tidak Baik)	:	25,00 - 64,99

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3.23
U2	Prosedur	3.31
U3	Waktu Pelayanan	3.3
U4	Biaya/Tarif	3.45
U5	Produk Layanan	3.29
U6	Kompetensi pelaksana	3.43
U7	Perilaku pelaksana	3.39
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.25
U9	Sarana dan Prasarana	3.58

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
OPD BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

NILAI IKM	Nama Layanan		
83	Jumlah	:	219 Orang
	Jenis Kelamin	:	L = 88 orang / P = 131 orang
	Pendidikan	:	SD = 4 orang
			SMP = 10 orang
			SMA = 77 orang
			DIII = 23 orang
			S1 = 84 orang
			S2 = 13 orang
			S3 = 2 orang
	Periode	:	01-01-2025 s/d 31-12-2025

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA
SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT



Survey Kepuasan Terhadap UKPBJ Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka menilai tingkat kepuasan layanan di UKPBJ Provinsi Sumatera Barat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi Survey Kepuasan Terhadap UKPBJ Provinsi Sumatera Barat. Data dan informasi yang diperoleh akan digunakan dalam rangka pengukuran capaian dan untuk meningkatkan pelayanan di UKPBJ Provinsi Sumatera Barat menjadi lebih berkualitas, cepat, mudah dan terukur. Terima kasih.

bpbjsumbar2024@gmail.com [Ganti akun](#)



Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama *

Jawaban Anda

Email *

Jawaban Anda

No. HP *

Jawaban Anda

Usia *

- ☐ < 20 tahun
- ☐ 20 - 29 tahun
- ☐ 30 - 39 tahun
- ☐ 40 - 49 tahun
- ☐ > 50 tahun

Jenis Kelamin *

- ☐ Laki-laki
- ☐ Perempuan

Pendidikan Terakhir *

- ☐ SD atau sederajat
- ☐ SLTP atau sederajat
- ☐ SLTA atau sederajat
- ☐ D3
- ☐ S1
- ☐ S2 ke atas

Keperluan Datang Ke UKPBJ *

Jawaban Anda

Pejabat yang ditemui *

- ☐ Kepala UKPBJ
- ☐ Pejabat LPSE
- ☐ Pokja
- ☐ Petugas Konsultasi
- ☐ Help Desk
- ☐ Yang lain: _____

Bertindak selaku apa anda datang ke UKPBJ *

- ☐ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- ☐ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- ☐ Pejabat Pengadaan (PP)
- ☐ Pokja Pemilihan
- ☐ Penyedia
- ☐ Auditor
- ☐ Admin Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- ☐ Admin Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- ☐ Operator SiRUP

Pengalaman anda di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *

- ☐ < 1 tahun
- ☐ 1 - 3 tahun
- ☐ 3 - 5 tahun
- ☐ > 5 tahun

Apakah anda merasa terbantu oleh Petugas/Pejabat UKPBJ *

- ☐ Tidak terbantu
- ☐ Kurang terbantu
- ☐ Cukup terbantu
- ☐ Terbantu
- ☐ Sangat terbantu

Bagaimana dengan fasilitas pelayanan di UKPBJ *

- ☐ Tidak memadai
- ☐ Kurang memadai
- ☐ Cukup memadai
- ☐ Memadai
- ☐ Sangat memadai

Apakah anda merasa terbantu dengan fasilitas pelayanan di UKPBJ *

- ☐ Tidak terbantu
- ☐ Kurang terbantu
- ☐ Cukup terbantu
- ☐ Terbantu
- ☐ Sangat terbantu

Bagaimana pendapat Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan di UKPBJ Provinsi Sumatera Barat *

- ☐ Tidak mudah
- ☐ Kurang mudah
- ☐ Cukup mudah
- ☐ Mudah
- ☐ Sangat mudah

Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya *

- ☐ Tidak sesuai
- ☐ Kurang sesuai
- ☐ Cukup sesuai
- ☐ Sesuai
- ☐ Sangat sesuai

Bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang diberikan oleh petugas/Pejabat UKPBJ *

- ☐ Tidak jelas
- ☐ Kurang jelas
- ☐ Cukup jelas
- ☐ Jelas
- ☐ Sangat Jelas

Bagaimana pendapat Anda tentang profesionalisme petugas dalam memberikan pelayanan *

- ☐ Tidak profesional
- ☐ Kurang profesional
- ☐ Cukup profesional
- ☐ Profesional
- ☐ Sangat profesional

Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan pelayanan di UKPBJ Provinsi Sumatera Barat *

- ☐ Tidak cepat
- ☐ Kurang cepat
- ☐ Cukup cepat
- ☐ Cepat
- ☐ Sangat cepat

Bagaimana pendapat Anda tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan *

- ☐ Tidak memuaskan
- ☐ Kurang memuaskan
- ☐ Cukup memuaskan
- ☐ Memuaskan
- ☐ Sangat memuaskan

Bagaimana pendapat Anda tentang kenyamanan di lingkungan UKPBJ Provinsi Sumatera Barat *

- ☐ Tidak nyaman
- ☐ Kurang nyaman
- ☐ Cukup nyaman
- ☐ Nyaman
- ☐ Sangat nyaman

Saran untuk perbaikan layanan *

Jawaban Anda

CHR

BIRO PBJ TAHUN 2025

**CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025**

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	KONDISI/PERMASALAHAN	KONDISI SEHARUSNYA	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Kelengkapan Dokumen Penyusunan LKj			
	Terdapat dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang belum diserahkan ke tim reviu yaitu: a. Surat Keputusan Kepala Biro untuk dokumen Indikator Kinerja Utama b. Crosscutting	Dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan LKj Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah diserahkan kepada tim reviu secara lengkap.	Agar dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan LKj Biro Pengadaan Barang dan Jasa diserahkan ke tim reviu secara lengkap untuk dilakukan pengujian terhadap dokumen Laporan Kinerja.	Sudah di konfirmasi akan ditindaklanjuti
2	Kesesuaian Outline LKJ OPD dengan Standar pada Pergub 71 Tahun 2020 jo. Pergub 2 Tahun 2025			
	Sistematika penulisan dalam LKj belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025, dimana penulisan bagian Pendahuluan belum ditempatkan sebagai BAB I dan seterusnya sesuai dengan format yang telah ditetapkan.	Sistematika penulisan LKj seharusnya mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025, dimana bagian Pendahuluan disajikan sebagai BAB I dan diikuti dengan bab selanjutnya sesuai format yang telah ditetapkan.	Agar menyesuaikan sistematika penulisan LKj sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu : BAB I Pendahuluan BAB II Perencanaan Kinerja BAB III Akuntabilitas Kinerja BAB IV Penutup	Sudah di ditindaklanjuti
	Bab I Pendahuluan			
	Bab I Pendahuluan sudah menyajikan Gambaran Umum Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) yang Sedang Dihadapi Organisasi, namun Dasar Pembentukan Organisasi dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi belum mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur No 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.	Penyajian Dasar Pembentukan Organisasi dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur No 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,	Agar memperbaiki LKj pada dasar pembentukan organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi (hal. 3) sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 dan	Sudah di konfirmasi akan ditindaklanjuti

No	KONDISI/PERMASALAHAN	KONDISI SEHARUSNYA	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT																				
		Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.	Peraturan Gubernur No 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.																					
	Lampiran																							
	LKj Biro Pengadaan Barang dan Jasa belum menyajikan Perjanjian Kinerja Esselon II sebagai lampiran.	LKj Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyajikan Perjanjian Kinerja Esselon II sebagai lampiran.	Agar menyajikan Perjanjian Kinerja Esselon II sebagai lampiran di LKj Biro Pengadaan Barang dan Jasa.	Sudah di konfirmasi akan ditindaklanjuti																				
3	Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja pada LKj dengan Renstra dan PK tahun 2025																							
	Tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang disajikan pada LKj telah sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada Renstra dan PK 2025.	-	-	-																				
4	Kesesuaian Target Kinerja pada LKj dengan target pada Renstra dan PK tahun 2025																							
	Terdapat ketidaksesuaian penyajian target indikator kinerja sasaran pada LKj dengan target indikator kinerja sasaran pada Renstra. Perbedaan target kinerja tersebut telah dijelaskan di dalam LKj namun, dasar penetapan target belum didukung data yang memadai. <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Indikator Kinerja Sasaran</th><th>Target Renstra</th><th>Target PK</th><th>Target LKj</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa minimal baik</td><td>97</td><td>70</td><td>70</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD</td><td>BB (75,30)</td><td>BB (70)</td><td>BB (70)</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi</td><td>A (90)</td><td>A (80)</td><td>A (80)</td></tr> </tbody> </table>	No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra	Target PK	Target LKj	1	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa minimal baik	97	70	70	2	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (75,30)	BB (70)	BB (70)	3	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	A (90)	A (80)	A (80)	Target kinerja pada Perjanjian Kinerja seharusnya selaras dengan target kinerja dalam Rencana Strategis dan jika terdapat perbedaan target, harus disertai dengan penjelasan dan data dukung yang memadai.	Agar melengkapi LKj (hal. 19) dengan penjelasan dan data dukung yang memadai atas perbedaan target kinerja dimaksud.	Sudah di konfirmasi akan ditindaklanjuti
No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra	Target PK	Target LKj																				
1	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa minimal baik	97	70	70																				
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (75,30)	BB (70)	BB (70)																				
3	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	A (90)	A (80)	A (80)																				

No	KONDISI/PERMASALAHAN	KONDISI SEHARUSNYA	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	a. LKj telah menyajikan capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja sasaran namun, analisis tersebut masih bersifat umum dan belum menguraikan analisis secara memadai. b. Terdapat dua indikator kinerja yang belum menjelaskan analisis komponen perhitungan nilai/indeks secara memadai yaitu : - Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik - Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	a. LKj seharusnya menyajikan analisis atas capaian kinerja yang komprehensif dengan menyajikan kinerja perangkat daerah dalam mencapai target yang ditetapkan. b. LKj seharusnya menguraikan analisis komponen perhitungan untuk indikator kinerja yang targetnya berbasis indeks atau nilai.	a. Agar LKj menyajikan analisis atas capaian kinerja perangkat daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan. b. Agar melengkapi LKj dengan menguraikan analisis komponen perhitungan capaian kinerja untuk indikator berbasis indeks atau nilai.	Sudah di konfirmasi akan ditindaklanjuti
6	Penyajian pada LKj telah dilengkapi dengan data pembandingan yang dibutuhkan			
	a. Capaian indikator kinerja sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi belum menyajikan perbandingan dan analisis capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir. b. Seluruh indikator dalam LKj belum menyajikan perbandingan dan analisis capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. c. Semua capaian indikator kinerja sasaran belum menyajikan data pembandingan dengan kinerja nasional/regional/atau daerah lain dengan indikator yang sama.	a. LKj seharusnya menyajikan perbandingan dan analisis capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir. b. LKj seharusnya menyajikan perbandingan dan analisis capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. c. LKj seharusnya menyajikan data pembandingan dengan kinerja nasional/regional/atau daerah lain dengan indikator yang sama.	a. Agar LKj menyajikan perbandingan dan analisis capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir. b. Agar LKj menyajikan perbandingan dan analisis capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. c. Agar LKj menyajikan data pembandingan dengan kinerja nasional/regional/atau daerah lain dengan indikator yang sama.	Sudah di konfirmasi akan ditindaklanjuti
7	Penyajian analisa penyebab keberhasilan/kegagalan telah disajikan secara memadai dalam LKj			
	Terdapat indikator kinerja yang belum menyajikan alternatif solusi atau langkah perbaikan kinerja untuk kedepannya, yaitu : a. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD b. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	LKj seharusnya menyajikan alternatif solusi atau langkah perbaikan kinerja.	Agar LKj menyajikan alternatif solusi atau langkah perbaikan kinerja.	Sudah di konfirmasi akan ditindaklanjuti

No	KONDISI/PERMASALAHAN	KONDISI SEHARUSNYA	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
8	Penyajian efisiensi penggunaan sumberdaya pada LKj			
	LKj Biro Pengadaan Barang dan Jasa belum menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran, sumber daya manusia, mekanisme, dan sarana prasarana) untuk seluruh indikator kinerja sasaran secara memadai.	LKj seharusnya menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran, sumber daya manusia, mekanisme, dan sarana prasarana) untuk seluruh indikator kinerja secara memadai.	Agar LKj disajikan dengan menambahkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran, sumber daya manusia, mekanisme, dan sarana prasarana) untuk seluruh indikator kinerja sasaran secara memadai.	Sudah di konfirmasi akan ditindaklanjuti
9	Penyajian realisasi anggaran pada LKj			
	LKj Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah menyajikan informasi terkait realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan namun, penyajian tersebut belum menguraikan keterkaitan antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian indikator kinerja, sehingga keterkaitan antara indikator kinerja dan anggaran belum tergambar secara jelas.	LKj seharusnya menyajikan realisasi anggaran yang tidak hanya berdasarkan program dan kegiatan, tetapi juga menguraikan keterkaitannya secara jelas dengan pencapaian indikator kinerja.	Agar menyajikan realisasi anggaran dalam LKj (hal. 39) dengan mengaitkan secara jelas antara anggaran yang digunakan pada setiap program kegiatan dan subkegiatan dengan capaian indikator kinerja.	Sudah di konfirmasi akan ditindaklanjuti
10	Tindaklanjuti atas rekomendasi APIP atas kelemahan LKj tahun sebelumnya			
	Masih terdapat rekomendasi APIP atas hasil evaluasi kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti, yaitu dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya mengungkapkan seluruh informasi tentang kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, jangka menengah, dengan tahun-tahun sebelumnya, secara nasional, keberhasilan dan kegagalan, upaya efisiensi atas penggunaan nyata dan hambatan, sumber daya (anggaran, sdm, mekanisme, sarana prasarana) dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.	Rekomendasi APIP pada evaluasi sebelumnya dijadikan pedoman untuk penyusunan LKj tahun berikutnya.	Agar memperbaiki LKj dengan menindaklanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya.	Sudah di konfirmasi akan ditindaklanjuti

*) Tanggung jawab tim terbatas pada dokumen yang diserahkan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROVINSI SUMATERA BARAT



CERRY M. S.T., M.M.
NIP. 19761016 200812 1 001

Padang, 27 Februari 2026
WAKIL PENANGGUNG JAWAB,



ALFIANORI, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19730509 199403 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

Padang, 4 Maret 2026

Nomor : P-700/261/INSP/III/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Reviu Laporan Kinerja OPD tahun 2026

Kepada Yth,
Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
di-
Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Reviu Laporan Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai Surat Tugas Nomor 700/21/Insp/I/2026 tanggal 31 Januari 2026, disampaikan sebagai berikut :

1. Reviu telah selesai dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2026 dan Hasil Reviu diserahkan dalam bentuk Catatan Hasil Reviu (terlampir) dengan saran perbaikan/rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD sampai dengan dilaksanakannya evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD pada Bulan Mei 2026.
2. Inspektorat juga telah mengeluarkan Pernyataan Telah Direviu (terlampir) untuk masing-masing OPD, agar dapat segera dimasukkan/*upload* dalam aplikasi E-SAKIP Reviu/*Esr* Kemenpan RB.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Inspektur,



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003